GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026

DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
JL. K.H. DEWANTARA NO. 108 TELP. (0624) 21118
RANTAUPRAPAT 21415

KATA PENGANTAR

Puji dan sykur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izinnya dan kehendaknya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 selesai disusun.
Rancangan Rancangan Renstra ini akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu. Dan hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu nantinya digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam pemutakhiran Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lima tahun ke depan tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin dan akuntabel.

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, kami ucapkan terima kasih. Semoga seluruh daya upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Rantauprapat, 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU

H. ILHAM, SKM, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670511 198903 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penyajian Rencana Strategis..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 10
2.1.1 Tugas, Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu..... 10
2.1.2 Struktur Organisasi..... 15
2.2. Sumber Daya SKPD..... 16
2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 16
2.2.2 Sarana dan Prasarana..... 25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan 34
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja 34
2.3.2 Kinerja Anggaran 50
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD..... 57
2.5.1 Tantangan 57
2.5.2 Peluang 59

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 63
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD..... **63**
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 67
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 73
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis..... 89
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 93

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 104
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD..... 95

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 100
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan..... 100
5.2. Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Deerah..... 105

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 111

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 141

BAB VIII PENUTUP 142

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	:	Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 dan Per September 2021	17
Tabel 2.2	:	Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Kepangkatan Kondisi Oktober 2021	18
Tabel 2.3	:	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 Kabupaten Labuhanbatu	18
Tabel 2.4	:	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	19
Tabel 2.5	:	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu	20
Tabel 2.6	:	Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis Menurut Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Per September 2021	22
Tabel 2.7	:	Ketersediaan Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Menurut Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Per September 2021	24
Tabel 2.8	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	25
Tabel 2.9		Kondisi Sarana Kesehatan Tahun 2021	26
Tabel 2.10		Kondisi Asset Dinas Kesehatan Tahun 2021	27
Tabel 2.11		Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu	28
Tabel 2.12		Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	29
Tabel 2.13		Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu	31
Tabel 2.14		Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	32
Tabel 2.15		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	33
Tabel 2.16		Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu	36

Tabel 2.17	Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	44
Tabel 2.18	Hasil Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2020	46
Tabel 2.19	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 – 2021	48
Tabel 2.20	Alokasi Anggaran APBD Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020	51
Tabel 2.21	Alokasi Anggaran Belanja Langsung APBD Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020	51
Tabel 2.22	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020	53
Tabel 2.23	Anggaran dan Realisasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020	54
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu	63
Tabel 3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	69
Tabel 3.3	Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung	76
Tabel 3.4	Telaahan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung	84
Tabel 3.5	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	92
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Kabupaten Labuhanbatu	101
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan	102
Tabel 5.3	Program Priorias dan Kegiatan Strategis Daerah	105
Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu	119
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	142

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020 34

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu-isu yang masih belum terselesaikan seperti masih tingginya kematian ibu dan kematian bayi, permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), beban ganda penyakit dimana penyakit menular masih muncul sedangkan tidak menular semakin meningkat, belum optimalnya upaya promotif dan preventif, serta rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World* : The 2030 Agenda f*or Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu Tanpa kemiskinan (Tujuan 1), Tanpa kelaparan (Tujuan 2), Kehidupan sehat dan sejahtera (Tujuan 3), dan Air Bersih dan sanitasi layak (Tujuan 6). Indikator SDGs antara lain imunisasi dasar lengkap pada bayi, akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar, STBM, Kematian Ibu, Pelayanan persalinan, pelayanan Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Bumil KEK dan Balita, Akreditasi Puskesmas, Stunting, dan lain-lain. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kamampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Tantangan baru pembangunan kesehatan yang dihadapi saat ini adalah pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019 baik dari aspek kepesertaan, pembiayaan, paket manfaat, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, pengaturan sistem rujukan, Health Technology Assessment (HTA), mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta termasuk penguatan produksi farmasi dan alat kesehatan. Tantangan lain terkait dengan perubahan struktur penduduk diikuti dengan transisi epidemiologi yang mendorong peningkatan prevalensi dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular termasuk new emerging desseases dan re emerging desseasses.

Keberhasilan pembangunan daerah, dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mencapai IPM tersebut salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indeks kesehatan selain indeks pendidikan dan indeks ekonomi. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan upaya utama untuk peningkatan sumber daya manusia, dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Terdapat 15 (lima belas) indikator sasaran strategis nasional yang diupayakan pencapaiannya melalui arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya Perubahan promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan teknologi. Arah kebjakan pembangunan kesehatan nasional tersebut dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu peningkatan Kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional tersebut adalah melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, yang mengamanatkan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah : (1) pendekatan politik, (2) pendektan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atas bawah (*top-down*), dan (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.1.1. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu.

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Labuhanbatu

2. Rancangan Awal Renstra SKPD Kabupaten Labuhanbatu termasuk Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatumenjadi input bagi Bappeda Kabupaten Labuhanbatuuntuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu.

3. Rancangan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu;

4. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu;

5. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Labuhanbatu dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

6. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu maka SKPD Kabupaten Labuhanbatu menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu juga menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

7. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.1.2. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu dan mengacu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melalui Forum SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

2. Rancangan Awal Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu termasuk Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu menjadi input bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Labuhanbatu.

3. Rancangan RKPD Kabupaten Labuhanbatu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Labuhanbatu;

4. Hasil Musrenbang Kabupaten Labuhanbatu digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Labuhanbatu;

5. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Labuhanbatu digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Labuhanbatu dalam

pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD;

6. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Labuhanbatu maka SKPD Kabupaten Labuhanbatu menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Labuhanbatu terpilih yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024"** dengan 2 (dua) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berkaitan dengan Kesehatan yaitu Misi ke-1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional dan Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan untuk Membangunan Karekter SDM yang Produktif dan inovatif.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 memperhatikan Isu-isu terkait kebijakan antara lain terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 disusun pada era pandemik Covid -19 belum berakhir. Dampak pandemik ini menyasar pada permasalahan di bidang kesehatan selain adanya pengaruh buruk terhadap sektor – sektor lain, mulai dari Pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain -lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka -3,44. Angka ini menggambarkan bahwa begitu parahnya dampak pandemik ke hampir semua sektor.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario – skenario pembangunan kesehatan yang strategis untuk dapat membangkitkan gairah pembangunan khususnya kesehatan secara bertahap di Kabupaten Labuhanbatu dan diharapkan bahwa dokumen ini akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun

2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Kepala Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana strategis ini didasarkan kepada Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2026 ;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klassifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuagan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024.
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
27. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2025;
30. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
31. Surat Keputusan Bupati Nomor 476/104/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Disamping Peraturan-Peraturan tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu juga senantiasa memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di Bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu disusun adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan;
2. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu saat ini sekaligug memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka meuwujudkan Visi dan Misi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang terarah dan terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pasa setiap tahun anggaran;
3. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada 2021-2026.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efektif, efisien dan berkelelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisme antar pelaku pembangunan bidang kesehatan;
6. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Kesehatan, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan derajat kesehatan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN RENCANA STRATEGIS

Penyajian rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari tujuh bab, yaitu:

Bab I **Pendahuluan**

Menguraikan Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten dan dengan Renja OPD, Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijasikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran Dinas Kesehatan, Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, serta Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menguraikan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah, Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi & tugasnya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang berisi Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

Menguraikan tentang permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Menguraikan rumusan pernyataan Stategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menguraikan indikator-indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII **Penutup**

Berisi harapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap Rancanagan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DERAH

Gambaran pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2021-2026 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan susunan organisasi perangkat Dinas Kesehatan terdiri atas: 1 (satu) sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset dan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dan memiliki 4 (empat) bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan memiliki 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fugsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Dinas Kesehatan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU

KEPALA DINAS KESEHATAN
TUGAS

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI KEPALA DINAS

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

SEKRETARIAT
TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
4. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET
TUGAS

Melaksanakan sebagian urusan Sekretaris dalam hal penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

FUNGSI

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
3. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan:
4. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan Anggaran Dinas;
5. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
6. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
7. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
8. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
10. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;
11. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
12. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/aset Dinas;
13. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

SUBBAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

FUNGSI

1. Penyiapan dan perumusan rencana kerja dan kebijakan operasional Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
2. Melaksanakan penyusunaan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan dan koordinasi penyusunaan program, anggaran, penyediaan data informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;

3. Mengoordinasikan perumusan perancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Mengoordinasikan ke Bagian Hukum Setdakab terkait penyusunan perumusan dan penyiapan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mempublikasikan produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;
6. Melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai yang bermasalah dengan hukum dalam pelaksanaan tugas dan mengoordinasikannya kepada pihak terkait;
7. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan dinas;
8. Melakukan pengendalian, pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan dinas;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan dinas;
11. Menyelenggarakan dan Mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat dinas dan upacara kantor;
12. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
TUGAS

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

UPTD
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat

pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor : 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

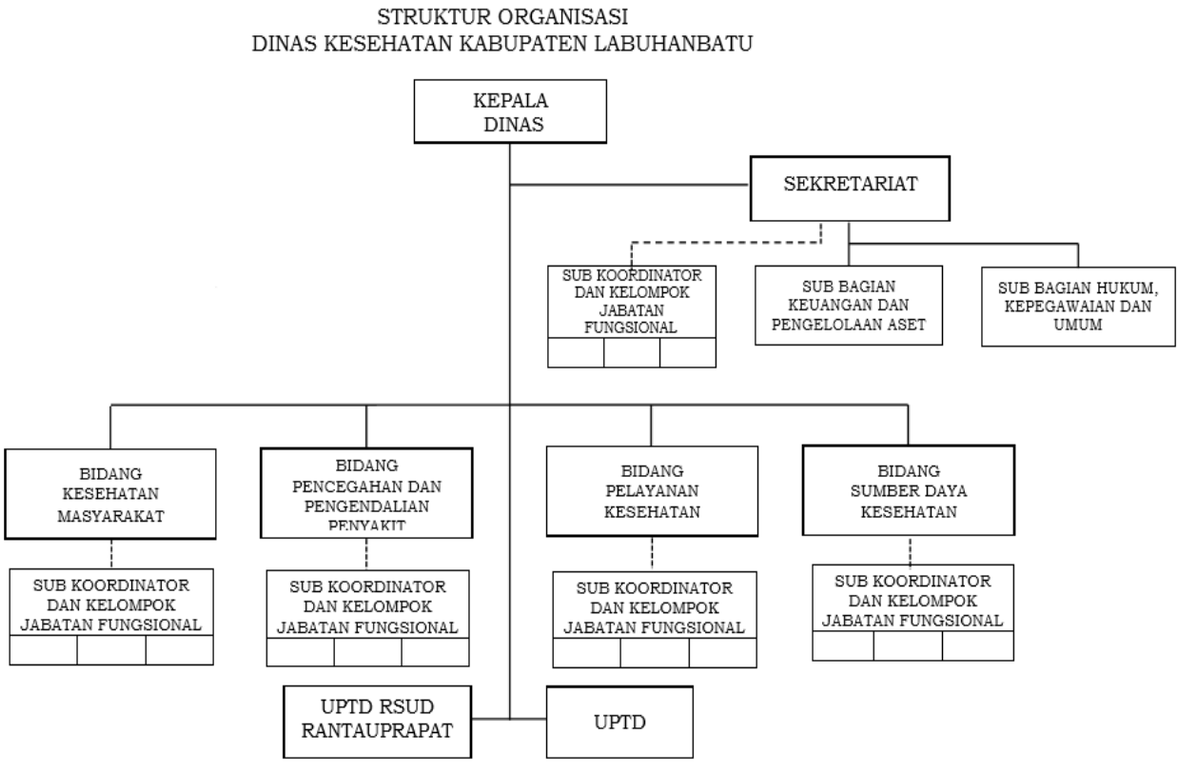

Rincian Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
   Membawahi :
   a. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
   b. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
   a. UPTD RSUD Rantauprapat
   b. UPTD

2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai tenaga kesehatan dan non kesehatan status PNS dan non PNS (PTT) yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 tercatat 765 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 dan Per September 2021

NO.	PENDIDIKAN		2020			Per September 2021		
			PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah
I.	MEDIS							
	1	Dokter Umum	47	29	76	45	27	72
	2	Dokter Gigi	11	3	14	12	5	17
	3	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0
II.	SARJANA KESEHATAN LAIN							
	1	Magister Kesehatan	8	0	8	6	0	6
	2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	70	0	70	74	0	74
	3	Apoteker	7	0	7	8	0	8
	4	D-III Farmasi	0	0	0	0	0	0
III.	PARAMEDIS							
	1	Sarjana Keperawatan/DIV Keperawatan	18	0	18	18	0	18
	2	DI/ DIII/ DIV Bidan/ SST	346	0	346	349	0	349
	3	Akademi Keperawatan (AKPER)	91	0	91	90	0	90
	4	Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)	22	0	22	23	0	23
	5	Akademi Keperawatan Gigi (AKG)	7	0	7	6	0	6
	6	Sekolah Pendidikan Perawat Gigi (SPRG)	2	0	2	2	0	2

IV.	PARAMEDIS NON PERAWAT							
	1	Nutritionist	14	0	14	14	0	14
	2	SPPH/D-III Sanitarian	10	0	10	9	0	9
	3	Analisis Kesehatan /Kimia Analis	16	0	16	16	0	16
	4	SAA/SMF	2	0	2	2	0	2
V.	NON KESEHATAN / ADMINISTRASI / TATA USAHA							
	1	Sarjana Non Kesehatan (S1)	11	0	11	13	0	13
	2	Sarjana Muda Non Kesehatan (D3)	3	0	3	3	0	3
	3	Sekolah Menengah Atas dan Lainnya	35	0	35	29	0	29
	4	Magister Non Kesehatan (S2)	3	0	3	3	0	3
	5	LCPK	6	0	6	6	0	6
Jumlah			**733**	**32**	**765**	**736**	**32**	**768**
Jumlah Total					**765**			

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu
Berdasarkan Kepangkatan Kondisi September 2021

NO.	UNIT KERJA	Kepangkatan/Golongan								Jumlah
		I	%	II	%	III	%	IV	%	
I.	**DINKES DAN UPT DINAS**	1	0,13	331	43,04	413	53,77	23	2,99	768

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Dari tabel 2.2 di atas bahwa Pegawai Negeri sipil yang bekerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2021 didominasi oleh pangkat golongan III sebanyak 413 orang atau 53,77%.

Tolok ukur kemampuan Pemeritah Daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan dokter dan tenaga Medis, yang dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk.

a. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah dokter terhadap jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rasio Dokter per Satuan Penduduk

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter	95	94	123	134	179
2	Jumlah penduduk	470.511	478.593	486.480	494.178	493.899
3	Rasio	1 : 4953	1 : 5091	1 : 3955	1 : 3688	1 : 2759

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, cakupan ideal pelayanan satu orang dokter adalah melayani 2.500 penduduk. Pada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu jumlah satu orang dokter melayani sebanyak 2.759 penduduk, sehingga cakupan ideal satu orang dokter belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Berikut disajikan tabel rasio dokter per satuan penduduk per kecamatan tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.4
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bilah Barat	Jumlah Dokter	11	12	10	14	18
		Jumlah Penduduk	39.219	40.042	40.850	41.620	39.953
		Rasio	1 : 3.565	1 : 3.337	1 : 4.085	1 : 2.973	1 : 2.220
2	Rantau Utara	Jumlah Dokter	27	19	42	40	54
		Jumlah Penduduk	94.789	96.539	98.242	99.885	96.485
		Rasio	1 : 3.511	1 : 5.081	1 : 2.339	1 : 2.497	1 : 1.787
3	Rantau Selatan	Jumlah Dokter	23	32	38	42	70
		Jumlah Penduduk	73.085	75.631	78.206	80.579	73.977
		Rasio	1 : 3.178	1 : 2.364	1 : 2.058	1 : 1.919	1 : 1.057
4	Bilah Hulu	Jumlah Dokter	5	12	9	14	15
		Jumlah Penduduk	62.750	63.616	64.440	65.267	64.416
		Rasio	1 :	1 :	1 :	1 :	1 :

			12.550	5.301	7.160	4.662	4.294
5	Pangkatan	Jumlah Dokter	3	1	1	3	7
		Jumlah Penduduk	33.621	33.809	33.972	34.177	37.766
		Rasio	1 : 11207	1 : 33809	1 : 33972	1 : 11392	1 : 5.395
6	Bilah Hilir	Jumlah Dokter	8	3	6	4	4
		Jumlah Penduduk	52.345	52.548	52.711	52.953	59.370
		Rasio	1 : 6.543	1 : 17.516	1 : 8,785	1 : 13.238	1 : 14.843
7	Panai Hulu	Jumlah Dokter	2	4	3	3	3
		Jumlah Penduduk	38.362	39.142	39.907	40.637	38.028
		Rasio	1 : 19.181	1 : 9.786	1 : 13.302	1 : 13.546	1 : 12.676
8	Panai Tengah	Jumlah Dokter	7	7	4	8	3
		Jumlah Penduduk	38.968	39.779	40.576	41.335	41.143
		Rasio	1 : 5.567	1 : 5.683	1 : 10.144	1 : 5.167	1 : 13.714
9	Panai Hilir	Jumlah Dokter	7	6	7	6	5
		Jumlah Penduduk	37.372	37.488	37.576	37.725	42.761
		Rasio	1 : 5.339	1 : 6.248	1 : 5.368	1 : 6.288	1 : 8.552

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk per kecamatan. Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan yang sudah memenuhi standar nasional yaitu satu orang dokter melayani 2500 penduduk.

b. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per satuan penduduk adalah banyaknya jumlah Tenaga Medis Per satuan Penduduk terhadap jumlah penduduk. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Bilah Barat	Jumlah Tenaga Medis	88	80	124	171	156
		Jumlah Penduduk	39.219	40.042	40.850	41.620	39.953
		Rasio	1:446	1 : 500	1 : 329	1 : 243	1 : 256
2	Rantau Utara	Jumlah Tenaga Medis	160	159	270	289	347
		Jumlah Penduduk	94.789	96.539	98.242	99.885	96.485
		Rasio	1 : 592	1 : 607	1 : 364	1 : 346	1 : 278
3	Rantau Selatan	Jumlah Tenaga Medis	325	415	513	589	553
		Jumlah Penduduk	73.085	75.631	78.206	80.579	73.977
		Rasio	1 : 225	1 : 182	1 : 152	1 : 137	1 : 134
4	Bilah Hulu	Jumlah Tenaga Medis	93	89	146	144	152
		Jumlah Penduduk	62.750	63.616	64.440	65.267	64.416
		Rasio	1 : 674	1 : 715	1 : 441	1 : 453	1 : 424
5	Pangkatan	Jumlah Tenaga Medis	34	33	51	51	50
		Jumlah Penduduk	33.621	33.809	33.972	34.177	37.766
		Rasio	1 : 989	1 : 1025	1 : 666	1 : 670	1 : 755
6	Bilah Hilir	Jumlah Tenaga Medis	44	48	115	144	127
		Jumlah Penduduk	52.345	52.548	52.711	52.953	59.370
		Rasio	1 : 1190	1 : 1095	1 : 458	1 : 368	1 : 467
7	Panai Hulu	Jumlah Tenaga Medis	31	32	63	55	53
		Jumlah Penduduk	38.362	39.142	39.907	40.637	38.028
		Rasio	1 : 1238	1 : 1223	1 : 633	1 : 739	1 : 718
8	Panai Tengah	Jumlah Tenaga Medis	54	27	89	130	122
		Jumlah Penduduk	38.968	39.779	40.576	41.335	41.143
		Rasio	1 : 722	1 : 1473	1 : 456	1 : 318	1 : 337
9	Panai Hilir	Jumlah Tenaga Medis	49	58	115	97	71

		Jumlah Penduduk	37.372	37.488	37.576	37.725	42.761
		Rasio	1 : 763	1 : 646	1 : 327	1 : 389	1 : 602

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, rasio jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk per kecamatan terdapat 3 kecamatan yang mengalami peningkatan yaitu Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, dan Rantau Selatan. Hal ini disebabkan penyebaran tenaga medis di setiap kecamatan masih belum merata.

c. Kondisi Ketenagaan Di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan. Penetapan Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas dibuat berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019 pasal 16 tentang Puskesmas. SDMK Puskesmas terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas kesehatan pertama di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

Jenis SDMK Puskesmas paling sedikit terdiri dari :

1. Dokter atau Dokter Layanan Primer
2. Dokter Gigi
3. Perawat
4. Bidan
5. Tenaga Kesehatan Masyarakat
6. Tenaga Kesehatan Lingkungan
7. Tenaga Gizi
8. Tenaga Kefarmasian
9. Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Selengkapnya disajikan kondisi data ketersediaan tenaga kesehatan tersebut di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis Menurut Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Per September 2021

No	Nama Puskesmas	Dokter			Dokter Gigi			Perawat			Bidan		
		Standar	Ada	Kurang/ Lebih	Standar	Ada	Kurang / Lebih	Standar	Ada	Kurang / Lebih	Standar	Ada	Kurang / Lebih
A.	**Puskesmas Non Rawat Inap**												
A. 1	**Puskesmas Kawasan Perkotaan**												
1	Rantauprapat	1	12	11	1	2	1	5	16	11	4	36	32
2	Perlayuan	1	1	0	1	1	0	5	8	3	4	28	24
3	Sigambal	1	6	5	1	1	0	5	12	7	4	44	40
	Jumlah	3	19	16	3	4	1	15	36	21	12	108	96
A. 2	**Puskesmas Kawasan Pedesaan**												
1	Suka Makmur	1	3	2	1	1	0	5	4	-1	4	12	8
2	Janji	1	8	7	1	1	0	5	15	10	4	37	33
3	Perbaungan	1	3	2	1	0	-1	5	1	-4	4	15	11
4	Lingga Tiga	1	5	4	1	1	0	5	14	9	4	28	24
5	Gunung Selamat	1	1	0	1	0	-1	5	6	1	4	19	15
6	Pangkatan	1	4	3	1	1	0	5	2	-3	4	26	22
7	Tanjung Haloban	1	1	0	1	1	0	5	3	-2	4	17	13
	Jumlah	7	25	18	7	5	-2	35	45	10	28	154	126
B	**Puskesmas Rawat Inap**												
B. 1	**Puskesmas kawasan Pedesaan**												
1	Negeri Lama	2	2	0	1	1	0	8	8	0	7	15	8
2	Teluk Sentosa	2	3	1	1	1	0	8	7	-1	7	18	11
	Jumlah	4	4	0	2	2	0	16	15	-1	14	33	19
B. 2	**Puskesmas kawasan Terpencil**												
1	Labuhan Bilik	2	3	1	1	0	-1	8	24	16	7	20	13
2	Sei Berombang	2	1	-1	1	0	-1	8	6	-2	7	13	6
3	Sei Penggantungan	2	1	-1	1	0	-1	8	3	-5	4	3	-1
	Jumlah	6	5	-1	3	0	-3	24	34	9	21	36	18
	Jumlah total	20	53	33	15	11	-4	90	130	39	75	331	259

Sumber : Bidang SDK

Kecukupan Dokter di Puskesmas Pada Puskesmas non rawat inap, minimal jumlah dokter yaitu satu orang, sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada Tabel 2.3, diketahui bahwa di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021 ada 9 Puskesmas memiliki dokter tersedia sesuai standar dan ada juga melebihi jumlah standar sedangkan ada 2 (dua) Puskesmas yang kekurangan tenaga Dokter (masing – masing 1 orang) yaitu Puskesmas Sei Berombang, dan Puskesmas Sei Penggantungan.

Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas, Jumlah dokter gigi di Puskesmas minimal satu orang, baik di Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021, terdapat 9 Puskesmas dengan jumlah dokter gigi cukup, satu Puskesmas dengan jumlah

dokter gigi yang melebihi standar, dan 5 Puskesmas tidak memiliki dokter gigi (Puskesmas Perbaungan, Gunung Selamat, Labuhan Bilik, Sei Berombang, dan Sei Penggantungan).

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di Puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pada tabel 2.3, diketahui bahwa di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 ada 14 Puskesmas memiliki bidan melebihi jumlah standar yang ditetapkan, dan 1 Puskesmas kekurangan bidan sebanyak 1 orang dari jumlah standar yaitu Puskesmas Sei Penggantungan.

Kecukupan Perawat di Puskesmas, Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah lima orang sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah delapan orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021, terdapat 8 Puskesmas memiliki jumlah perawat lebih dari standar yang ditetapkan, 7 puskesmas kekurangan perawat,. Kekurangan perawat ini terjadi karena distribusi perawat yang ada tidak merata sesuai standar.

Tabel 2.7
Ketersediaan Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Menurut Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Per September 2021

No	Nama Puskesmas	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Kefarmasian			Nutrisionis			Tenaga Sanitarian			Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku			Ahli Teknologi Laboratorium Medis		
		Standar	Ada	Kurang/ Lebih	Standar	Ada	Kurang/ Lebih	Standar	Ada	Kurang/ Lebih	Standar	Ada	Kurang/ Lebih	Standar	Ada	Kurang/ Lebih
A.	**Puskesmas Non Rawat Inap**															
A. 1	**Puskesmas Kawasan Perkotaan**															
1	Rantauprapat	1	3	2	1	3	2	1	0	-1	2	7	5	1	1	0
2	Perlayuan	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	2	1	-1	1	1	0
3	Sigambal	1	1	0	1	0	-1	1	1	0	2	3	1	1	1	0
	Jumlah	**3**	**4**	**1**	**3**	**3**	**0**	**3**	**1**	**-2**	**6**	**11**	**5**	**3**	**3**	**0**
A. 2	**Puskesmas Kawasan Pedesaan**															
1	Suka Makmur	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	2	1	0	-1
2	Janji	1	3	2	1	1	0	1	1	0	1	9	8	1	1	0
3	Perbaungan	1	1	0	1	1	0	1	0	-1	1	8	7	1	2	1
4	Lingga Tiga	1	1	0	1	0	-1	1	1	0	1	3	2	1	1	0
5	Gunung Selamat	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	3	2	1	0	-1
6	Pangkatan	1	0	-1	1	0	-1	1	3	2	1	6	5	1	1	0
7	Tanjung Haloban	1	0	-1	1	1	0	1	1	0	1	3	2	1	1	0
	Jumlah	**7**	**6**	**-1**	**7**	**4**	**-3**	**7**	**7**	**0**	**7**	**35**	**28**	**7**	**6**	**-1**
B	**Puskesmas Rawat Inap**															
B. 1	**Puskesmas kawasan Pedesaan**															
1	Negeri Lama	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
2	Teluk Sentosa	1	0	-1	1	1	0	1	1	0	1	3	2	1	2	1
	Jumlah	**2**	**2**	**0**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**5**	**3**	**2**	**4**	**2**
B. 2	**Puskesmas kawasan Terpencil**															
1	Labuhan Bilik	1	0	-1	1	0	-1	1	1	0	1	7	6	1	1	0
2	Sei Berombang	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	5	4	1	1	0
3	Sei Penggantungan	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
	Jumlah	3	0	-3	3	0	-3	3	1	-2	3	12	9	3	2	-1
	Jumlah total	**15**	**12**	**-3**	**15**	**10**	**-5**	**15**	**12**	**-3**	**18**	**63**	**45**	**15**	**15**	**0**

Sumber : Bidang SDK

Jumlah Puskesmas yang Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas tidak hanya tenaga medis tetapi juga tenaga promotif dan preventif untuk mendukung tugas Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 - 2024, salah satu indikator dalam meningkatkan ketersedian dan mutu SDMK sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yaitu jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, diketahui bahwa di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, ketersediaan lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif di puskesmas masih kurang. Jumlah Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Kawasan Terpencil masih kurang tiga orang yaitu Puskesmas Labuhan Bilik, Sei berombang, dan Sei Penggantungan (masing – masing satu orang).

Jumlah Nutrisionis di Puskesmas non rawat inap Kawasan Pedesaan dan Kawasan Terpencil masih kurang. Untuk Puskesmas non Rawat Inap

Kawasan Pedesaan di Puskesmas Lingga Tiga, Gunung Selamat, dan Pangkatan masing – masing masih kurang satu orang. Kemudian di Puskesmas Rawat Inap Kawasan Terpencil yaitu Puskesmas Labuhan Bilik, Sei Berombang, dan Sei Penggantungan masing – masing kurang satu orang.

Jumlah Tenaga Sanitarian di Puskesmas non rawat inap dan di Puskesmas rawat inap minimal satu orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Puskesmas yang memiliki sebanyak 9 Puskesmas dan yang tidak memiliki ada sebanyak 6 puskesmas yaitu Puskesmas Kota Rantauprapat, Puskesmas Perlayuan, Puskesmas Perbaungan, Puskesmas Gunung Selamat, Puskesmas Sei Berombang dan Puskesma Sei Penggantungan.

Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku rata -rata mengalami kelebihan untuk Mayoritas Puskesmas, kecuali Puskesmas Perlayuan dan Puskesmas Sei Penggantungan masih kekurangan satu tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku.

Jumlah Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis untuk jumlah total semua Puskesmas sudah sesuai standar, tetapi ada yang melebihi dan kekurangan julmah tenaga dari standar untuk beberapa Puskesmas. Puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis yaitu jenis Puskesmas Non Rawat Inap Kawasan Pedesaan (Puskesmas Suka Makmur dan Puskesmas Gunung Selamat masing – masing satu tenaga), dan Puskesmas Rawat Inap Kawasan Terpencil yaitu Puskesmas Sei Penggantungan masih kekurangan satu tenaga Ahli Laboratorium Medis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Tahun 2021
1	*2*	*3*
1	Puskesmas	15
2	Puskesmas Baru	-
3	Puskesmas Pembantu	50
4	Puskesmas Keliling	8
5	Poskesdes	86
6	Posyandu	541
7	Rumah Sakit Umum Daerah	1
8	Rumah Sakit BUMN	-
9	Rumah Sakit Swasta	5
10	Rumah Bersalin	-

11	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-
12	Balai Pengobatan Swasta	-
13	Laboratorium Swasta	2
14	Optikal	
15	Apotek	49
16	Toko Obat	78
17	Praktek Dokter Umum perorangan	86
18	Praktek Dokter Spesialis	44
19	Praktek Dokter Gigi	22
20	Praktek Bidan	15
21	Praktek Perawat	3
22	Pengobatan Tradisional	3
23	Klinik	45

Sumber : Bidang Yankes, Seksi Farmasi, dan Seksi Promkes

Berikut disajikan data Kondisi Sarana Kesehatan pemerintah kondisi September 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.9.
Kondisi Sarana Kesehatan Tahun 2021

No.	Sarana Kesehatan	Kondisi				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Jumlah
1.	Puskesmas	7	5	2	1	15
2.	Pustu	23	18	4	5	50
3.	Poskesdes	32	32	5	17	86
4.	Pusling	1	6	1	-	8
5.	Ambulans	4	1	1	8	15
6.	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	41	25	3	7	76

Sumber : Bidang Yankes

Jika melihat dari pada kondisi sarana kesehatan yang tersedia kondisi fisik puskesmas hampir 46,66% berada pada kondisi baik, sedangkan pustu 46% kondisi baik dan poskesdes 37,20%. Selanjutnya untuk sarana transportasi pusling/ambulans 31,73% kondisi baik dan berfungsi dan untuk rumah dinas tenaga kesehatan 53,97% kondisi baik.

Sumber Daya Modal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Kondisi Asset Dinas Kesehatan Tahun 2021

No.	Fasilitas /Aset	Tahun 2020	
		Jumlah	Satuan
1.	Tanah Bangunan	123	Lokasi
2.	Gedung Bangunan	251	Lokasi
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	unit
4.	Mobil Ambulance	26	unit
5.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	5	unit
6.	Sepeda Motor	105	unit
7.	Alat-alat Kedokteran dan alat kesehatan lainnya	1788	unit
8.	Alat-alat Laboratorium	120	unit
9.	Prasarana Listrik	10	unit
10.	Peralataan dan perlengkapan kantor	1511	unit
11.	Peralatan Komputer, Laptop dan kelengkapan lainnya	467	unit
12.	Projector dan layar projector	28	unit
13.	Televisi	40	unit
14.	Wireless	76	unit
15.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	80	unit
16.	Saluran pembuangan air buangan, instalasi pengolahan bahan bangunan dan Bangunan Buster pump	5	lokasi

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan

Sehingga ke depan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan masih merupakan salah satu fokus prioritas antara lain peningkatan kualitas fisik puskesmas sesuai standar termasuk pemenuhan fasilitas ruangan puskesmas yang belum lengkap sesuai standar untuk puskesmas rawat inap dan non rawat inap, peningkatan beberapa kualitas fisik pustu dan poskesdes serta rumah dinas. Tidak hanya itu pemenuhan akan sarana pusling juga harus dipenuhi, ketersedian pusling hanya 8 puskesmas yang memiliki dan hanya 1 dengan kondisi baik, sehingga diharapkan 7 puskesmas lagi dapat memiliki sarana pusling untuk membantu pelayanan kesehatan di luar gedung. Sedangkan pemenuhan ambulance sudah 15 Puskesmas yang memiliki ambulans dan 8 kondisi rusak berat.

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangakauan pelayanan ksehatan di suatu wilayah daerah terhadap penduduknya.

a. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Berikut adalah Tabel jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.11
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	13	14	15	15	15
2.	Jumlah Poliklinik	50	52	54	54	45
3.	Jumlah Pustu	49	49	49	51	50
4.	Jumlah Penduduk	470.511	478.593	486.480	494.178	493.899
5.	Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	1: 27.630	1: 29.252	1: 30.834	1: 30.353	1: 30.371
6.	Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	1 : 10.627	1 : 10.865	1 : 11.100	1 : 10.927	1 : 9.111
7.	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	1 : 10.414	1 : 10.238	1 : 10.072	1 : 10.320	1 : 10.124

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio puskesmas persatuan penduduk cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016, satu unit puskesmas dapat melayani 27.630 penduduk dan pada tahun 2020 satu unit Puskesmas melayani 30.371 penduduk. Rasio poliklinik cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dan pada tahun 2020 satu poliklinik dapat melayani 9.111 penduduk. Untuk Rasio Puskesmas pembantu di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan trend yang fluktuatif, pada tahun 2016 satu unit pustu dapat melayani 10.414 penduduk menurun menjadi satu unit pustu dapat melayani 10.124 penduduk pada tahun 2020. Berikut disajikan data jumlah dan rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk per kecamatan tahun 2016-2020.

Tabel 2.12

Jumlah dan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bilah Barat	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	2	2	2	2	2
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	39.219	40.042	40.850	41.620	39.953
		Rasio Puskesmas	1: 19.610	1: 20.021	1: 20.425	1: 20.810	1: 19.977
		Rasio Poliklinik	1: 19.610	1:34.601	1:17.596	1:18.760	1:19.189
		Rasio Pustu	1: 5603	1: 5720	1: 5836	1: 5946	1: 5708
2	Rantau Utara	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	12	12	16	14	13
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	94.789	96.539	98.242	99.885	96.485
		Rasio Puskesmas	1: 47.395	1: 48.270	1: 49.121	1: 49.943	1: 48.243
		Rasio Poliklinik	1: 7899	1: 8045	1: 6.410	1:7.135	1: 7.422
		Rasio Pustu	1: 18.958	1: 19.308	1: 19.648	1: 19.977	1: 19.297
3	Rantau Selatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	7	7	12	11	12
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	73.085	75.631	78.206	80.579	73.977
		Rasio Puskesmas	1 : 73.085	1 : 75.631	1 : 78.206	1 : 80.579	1 : 73.977
		Rasio Poliklinik	1 : 10.441	1 : 10.804	1 6.517	1 : 7.325	1 : 6165
		Rasio Pustu	1 : 18.271	1 : 18.907	1 : 19.552	1 : 20.145	1 : 18.493
4	Bilah Hulu	Jumlah Puskesmas	3	3	3	3	3
		Jumlah Poliklinik	5	5	5	4	5
		Jumlah Pustu	5	5	8	8	8
		Jumlah Penduduk	62.750	63.616	64.440	65.267	64.416
		Rasio Puskesmas	1 : 20.917	1 : 21.205	1 : 21.480	1 : 21.756	1 : 21.472

		Rasio Poliklinik	1 : 12.550	1 : 12.723	1 : 12.888	1 : 16.317	1 : 12.883
		Rasio Pustu	1 : 12.550	1 : 12.723	1 : 8.055	1 : 8.158	1 : 8052
5	Pangkatan	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	4	4	4	3	4
		Jumlah Pustu	7	7	7	7	7
		Jumlah Penduduk	33.621	33.809	33.972	34.177	37.766
		Rasio Puskesmas	1 : 33.621	1 : 33.809	1 : 33.972	1 : 34.177	1 : 37.766
		Rasio Poliklinik	1:8.405	1:8.452	1:8.493	1:11.392	1:9.422
		Rasio Pustu	1 : 4803	1 : 4.830	1 : 4.853	1 : 4.882	1 : 5.395
6	Bilah Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah Poliklinik	9	9	11	10	10
		Jumlah Pustu	5	5	5	6	6
		Jumlah Penduduk	52.345	52.548	52.711	52.953	59.370
		Rasio Puskesmas	1 : 26.173	1 : 26.274	1 : 26.356	1 : 26.477	1 : 29.685
		Rasio Poliklinik	1 : 5.816	1 : 5.839	1 : 4.792	1 : 5.295	1 : 5.937
		Rasio Pustu	1 : 10.469	1 : 10.509	1 : 10.542	1 : 8.826	1 : 9.895
7	Panai Hulu	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	3	4	0
		Jumlah Pustu	4	4	4	4	4
		Jumlah Penduduk	38.362	39.142	39.907	40.637	38.028
		Rasio Puskesmas	1 : 38.362	1 : 39.142	1 : 39.907	1 : 40.637	1 : 28.028
		Rasio Poliklinik	1 : 12.787	1 : 13.047	1 : 13.302	1 : 10.159	0
		Rasio Pustu	1 : 9.591	1 : 9.786	1 : 9.977	1 : 10.159	1 : 9.507
8	Panai Tengah	Jumlah Puskesmas	1	1	1	1	1
		Jumlah Poliklinik	3	3	3	3	6
		Jumlah Pustu	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	38.968	39.779	40.576	41.335	41.143
		Rasio Puskesmas	1 : 38.968	1 : 39.779	1 : 40.576	1 : 41.335	1 : 41.143
		Rasio Poliklinik	1:19.989	1:13.260	1:13.525	1:13.778	1:6.857
		Rasio Pustu	1 : 7.794	1 : 7.956	1 : 8.115	1 : 8.267	1 : 8.229
9	Panai Hilir	Jumlah Puskesmas	2	2	2	2	2
		Jumlah	0	0	0	0	0

		Poliklinik					
		Jumlah Pustu	5	5	5	4	4
		Jumlah Penduduk	37.372	37.488	37.576	37.725	42.761
		Rasio Puskesmas	1 : 18.686	1 : 18.744	1 : 18.788	1 : 18.863	1 : 21.381
		Rasio Poliklinik	0	0	0	0	0
		Rasio Pustu	1 : 7.474	1 : 7.497	1 : 7.515	1 : 9.431	1 : 10.690

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio puskesmas per satuan penduduk per kecamatan tahun 2016 – 2020 berbanding terbalik dengan rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten tahun 2016 – 2020 yaitu cenderung mengalami penurunan, dimana dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu terdapat 7 kecamatan yang cenderung mengalami penurunan dan hanya 2 kecamatan yang cenderung mengalami peningkatan yaitu kecamatan Bilah Hulu dan Panai Hilir. Untuk poliklinik di Kabupaten Labuhanbatu terdapat dua Kecamatan yang tidak tersedia poliklinik yaitu kecamatan Panai Hulu dan Kecamatan Panai Hilir sehingga layanan kesehatan berpusat pada puskesmas yang ada di dua kecamatan tersebut. Untuk Rasio Puskesmas pembantu per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan trend yang cenderung yang cenderung fluktuatif.

b. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Berikut adalah Tabel jumlah dan rasio Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.13
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	6	7	7	7
2.	Jumlah Penduduk	470.511	478.593	486.480	494.178	493.899
3.	Rasio	1 : 78.419	1 : 79.766	1 : 69.497	1 :70.597	1 :70.557

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk menunjukkan trend yang cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2016, satu unit Rumah Sakit dapat melayani 78.419 penduduk dan menurun menjadi satu unit Rumah Sakit dapat melayani 70.557 penduduk pada tahun 2020 karena ada penambahan satu unit rumah sakit di Kabupaten Labuhanbatu. Berikut disajikan pula tabel jumlah dan rasio rumah sakit per

satuan penduduk per kecamatan tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.14
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bilah Barat	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	39.219	40.042	40.850	41.620	39.953
		Rasio	0	0	0	0	0
2	Rantau Utara	Jumlah Rumah Sakit	5	5	5	5	5
		Jumlah Penduduk	94.789	96.539	98.242	99.885	96.485
		Rasio	1 : 18.957	1 : 19.308	1 : 19.648	1 : 19.977	1 : 19.297
3	Rantau Selatan	Jumlah Rumah Sakit	1	1	2	2	2
		Jumlah Penduduk	73.085	75.631	78.206	80.579	73.977
		Rasio	1 : 73.085	1 : 75.631	1 : 39.102	1 : 40.290	1 : 36.989
4	Bilah Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	62.750	63.616	64.440	65.267	64.416
		Rasio	0	0	0	0	0
5	Pangkatan	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	33.621	33.809	33.972	34.177	37.766
		Rasio	0	0	0	0	0
6	Bilah Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	52.345	52.548	52.711	52.953	59.370
		Rasio	0	0	0	0	0
7	Panai Hulu	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	38.362	39.142	39.907	40.637	38.028
		Rasio	0	0	0	0	0
8	Panai Tengah	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0
		Jumlah Penduduk	38.968	39.779	40.576	41.335	41.143
		Rasio	0	0	0	0	0
9	Panai Hilir	Jumlah Rumah Sakit	0	0	0	0	0

		Jumlah Penduduk	37.372	37.488	37.576	37.725	42.761
		Rasio	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 2 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki rumah sakit yaitu Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk per kecamatan tahun 2016 – 2020 dari 2 kecamatan tersebut cenderung fluktuatif karena di Kecamatan Rantau Selatan terdapat penambahan satu unit Rumah Sakit mulai tahun 2018.

Salah satu pendukung utama terlaksananya pelayanan kesehatan adalah ketersediaan alat kesehatan. Terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan JKN yang optimal dan Akreditasi Puskesmas. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di Puskesmas dilihat berdasarkan data kondisi ASPAK di Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 yang mana kondisi persentase kelengkapannya Per Juni 2021 antara lain :

Tabel 2.15.
Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Nama Puskesmas	Persentase Kelengkapan (%)			
		Sarana	Prasarana	Alkes	Kumulatif SPA
1.	Tanjung Haloban	100	61,11	53,33	77,44
2.	Suka Makmur	100	60,38	46,91	74,8
3.	Perlayuan	100	42,59	46,71	72,94
4.	Perbaungan	100	45,28	41,65	71,19
5.	Kota Rantauprapat	100	56,6	40,45	71,84
6.	Lingga tiga	100	39,62	39,86	69,91
7.	Sigambal	100	49,06	38,72	70,39
8.	Labuhan Bilik	100	67,92	36,55	71,41
9.	Sei Berombang	100	56,6	29,67	67,53
10.	Janji	100	59,26	25,69	66,2
11.	Gunung Selamat	100	33,96	25,09	63,43
12.	Pangkatan	100	35,19	21,48	62,11
13.	Negeri Lama	100	58,49	15,86	62,19
14.	Teluk Sentosa	100	39,62	15,51	60,17
15.	Sei Penggantungan	100	43,4	11,36	58,88

Sumber : ASPAK Dinas Kesehatan

Ketersediaan Prasarana dan peralatan kesehatan serta penunjang puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan saat ini masih kurang jika dilihat berdasarkan standar dalam Permenkes 43 Tahun 2019 untuk puskesmas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes /319 Tahun 2020. Berdasarkan aplikasi ASPAK, Puskesmas dengan persentase kelengkapan SPA > 70% ada 7 (tujuh) puskesmas sedangkan Puskesmas dengan persentase kelengkapan SPA < 70% ada sebanyak 8 Puskesmas yaitu

Puskesmas Lingga Tiga, Sei Berombang, Gunung selamat, Pangkatan, Negeri Lama, Teluk Sentosa.

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dilkukan untuk melihat seberapa besar peran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintahaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, seberapa kuat daya dukung sumber dayanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021, perbandingan capaian perbandingan capaian kinerja antara Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021, serta hambatan dan permasalah yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2016 IPM 70,50 meningkat di tahun 2020 menjasi 72,01. IPM dikategorikan menjadi 3, yaitu IPM tinggi (IPM ≥ 80), IPM sedang (IPM 50-79,99) dan IPM rendah (IPM <50). Berdasarkan kategori tersebut keadaan IPM Kabupaten Labuhanbatu memiliki IPM sedang. Berikut disajikan IPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2020 (Grafik 2.1):

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020

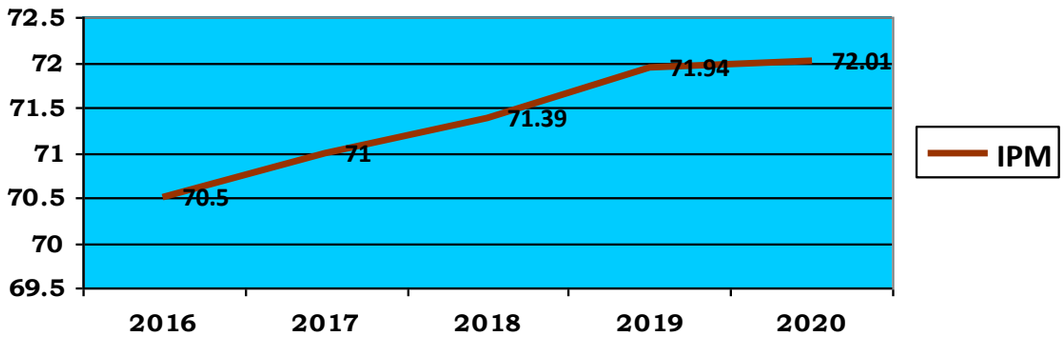

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu

Berikut diuraikan secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dinas kesehatan Tahun 2016 -2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 2.16. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LABUHANBATU

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Harapan Hidup		72	72	69	70	71	71	72	69.46	69.44	69.6	69.86	69.93	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97
2	Jumlah kematian ibu maternal			4	9	8	7	6	5	11	15	4	9	4	0.82	0.53	1.75	0.67	1.25
3	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup			1	6	5	4	3	2	5.98	5.04	5.89	5.59	2.96	1.00	0.99	0.68	0.54	0.68
4	Prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita			<15	21	20	18	18	15	0.64	2.91	4.62	1.45	9.05	32.81	6.87	3.90	12.41	1.66
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100	100	100	100	100	100	93.97	97.66	93.74	94.66	93.08	0.94	0.98	0.94	0.95	0.93
6	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100	100	100	100	100	100	73.52	62.27	64.10	73.59	70.59	0.74	0.62	0.64	0.74	0.71
7	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%	100	100	100	100	100	100	81.36	84.44	90.89	89.94	84.60	0.81	0.84	0.91	0.90	0.85
8	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100	100	100	100	100	100	80.89	81.96	89.39	91.62	91.18	0.81	0.82	0.89	0.92	0.91
9	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	100%			100	100	100	100	100	80.89	81.96	89.39	91.62	91.18	0.81	0.82	0.89	0.92	0.91
10	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100	100	100	100	100	100	96.60	88.57	87.60	73.03	91.71	0.97	0.89	0.88	0.73	0.92

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	98.73	25.6	100	21.55	1.00	0.99	0.26	1.00	0.22
12	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (PKPR)				6	8	10	12	15	6	8	15	15	15	1.00	1.00	1.50	1.25	1.00
13	Jumlah Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP/A				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu laksana KtP/A dan PPT/PKT di RS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar				4	8	12	15	15	4	6	14	15	15	1.00	0.75	1.17	1.00	1.00
16	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin				100	100	100	100	100	NA	80.11	100	100	100	NA	0.80	1.00	1.00	1.00
18	Persentase balita kurus yang mendapat tambahan makanan				76	80	83	85	88	54.49	80.11	100	100	41.81	0.72	1.00	1.20	1.18	0.48
19	Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah				15	20	25	30	35	NA	5	36	100	53.5	NA	0.25	1.44	3.33	1.53
20	Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang mendapatkan PMT				50	65	80	95	100	47.64	93.38	100	98.44	100	0.95	1.44	1.25	1.04	1.00

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Cakupan balita ditimbang berat badannya				77	77	78	79	79	86.3	74.41	73.83	75.64	54.9	1.12	0.97	0.95	0.96	0.69
22	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif				36	40	44	48	51	37.74	33.1	33.22	33.68	17.42	1.05	0.83	0.76	0.70	0.34
23	Angka Non AFP Rate pada anak usia <15 tahun per 100000 penduduk			≤2	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	0	0	0	0	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
24	Puskesmas yang memiliki sertifikat akreditasi			15	3	6	9	12	15	2	2	8	15	15	0.67	0.33	0.89	1.25	1.00
25	Jumlah Puskesmas yang menerapkan BLUD				NA	NA	1	2	2	NA	NA	0	0	0	NA	NA	0.00	0.00	0.00
26	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten setiap tahunnya				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
27	Puskesmas yang memiliki dokumen profil kesehatan puskesmas				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
28	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SIP sesuai standar				NA	NA	10	12	14	NA	NA	13	15	15	NA	NA	1.30	1.25	1.07
29	Jumlah puskesmas dengan persentase kelengkapan sarana puskesmas sesuai standar >80%				3	6	9	12	15	6	15	15	15	15	2.00	2.50	1.67	1.25	1.00
30	Persentase puskesmas pembantu dan poskesdes kondisi baik				74	80	87	93	100	57.35	78	62	80	80	0.78	0.98	0.71	0.86	0.80

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Index-API) per 1000 penduduk			<1	<1	<1	<1	<1	<1	11.05	0.63	3.29	0	2.19	11.16	0.64	3.32	0.00	2.21
32	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	1.16	92.83	10.00	6.68	45.00	1.16	0.93	0.10	6.68	45.00
33	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100.00	84.00	39.20	86.80	1.00	100.00	84.00	0.39	0.87
34	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	94.3	100.00	100.00	63.58	32.35	0.94	1.00	1.00	0.64	0.32
35	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100.00	53.52	51.86	24.40	1.00	1.00	0.54	0.52	0.24
36	Cakupan desa/kel UCI			100%	90	95	95	99	100	95	92.86	96.94	97.96	98.98	1.06	0.98	1.02	0.99	0.99
37	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk				<49	<49	<49	<49	<49	67.37	17	14.59	22.06	17.74	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00
38	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu				-	-	4	8	12	NA	NA	3	3	3	-	-	0.75	0.38	0.25
39	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				-	-	4	8	12	NA	NA	3	15	15	-	-	0.75	1.88	1.25
40	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		100	100	100	100	100	NA	100	100.00	100.00	100.00	NA	1.00	1.00	1.00	1.00
41	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100	100	100	100	100	NA	2.46	15.60	10.78	56.70	NA	0.02	0.16	0.11	0.57

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%				100	100	100	100	100	100	100	100	NIHIL	100	1.00	1.00	1.00	NIHIL	1.00
43	Persentase RT yang ber PHBS (IKU)			65	64	64	64	65	65	66.57	61.5	65	60.69	52.05	1.04	0.96	1.02	0.93	0.80
44	Cakupan desa siaga aktif (mandiri)				10	15	20	25	35	0	0	14.29	0	0	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
45	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			75	73	73	74	74	75	74.25	77.66	78.55	81.2	81.89	1.02	1.06	1.06	1.10	1.09
46	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak			85	84	84	84	85	85	86.39	87	88.05	93.68	92.18	1.03	1.04	1.05	1.10	1.08
47	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM				42	45	48	51	54	52	57	81	81	90.82	1.24	1.27	1.69	1.59	1.68
48	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan				74	75	76	76	77	76.45	80.83	82.05	80.29	80.35	1.03	1.08	1.08	1.06	1.04
49	Persentase tempat pengolahan makanan sehat				71	73	75	77	78	74.19	75.44	75.12	77.21	77.88	1.04	1.03	1.00	1.00	1.00
50	Persentase tempat-tempat umum sehat				77	78	78	79	79	80.89	84.66	77.78	81.16	80.67	1.05	1.09	1.00	1.03	1.02
51	Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95		95	47	58	63	78	95	46.19	43	51.14	54.69	55.31	0.98	0.74	0.81	0.70	0.58

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52	Persentase SDM Kesehatan puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya (Dokter,perawat dan bidan)				65	70	75	80	90	51.45	68.46	45	62.86	84	0.79	0.98	0.60	0.79	0.93
53	Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 minimal jenis ketenagaan				1	1	5	1	1	1	1	0	7	2	1.00	1.00	0.00	7.00	2.00
54	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas				90	90	90	90	90	181.92	90	100	100	90	2.02	1.00	1.11	1.11	1.00
55	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar				6	6	7	8	12	11	15	15	15	8	1.83	2.50	2.14	1.88	0.67
56	Jumlah puskesmas dengan persentase kelengkapan peralatan kesehatan sesuai standar >80%				NA	5	7	10	12	NA	0	0	0	0	NA	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Persentase apotik, toko obat, dan swalayan yang dibina				100	100	100	100	100	95	100	100	100	80	0.95	1.00	1.00	1.00	0.80

Dari 57 indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada Renstra 2016 - 2020 terdapat 28 indikator sudah mencapai target atau sekitar 49,12% dan sebanyak 29 indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan atau sekitar 50,78%.

Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target antara lain :

1. Jumlah kematian ibu maternal
2. Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita
3. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (PKPR)
4. Jumlah Puskesmas mampu tata laksana KtP/A
5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu laksana KtP/A dan PPT/PKT di RS
6. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar
7. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
9. Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah
10. Persentase Ibu Hamil KEK dan Anemia yang mendapatkan PMT
11. Angka Non AFP Rate pada anak usia <15 tahun per 100000 penduduk
12. Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten setiap tahunnya
13. Puskesmas yang memiliki dokumen profil kesehatan puskesmas
14. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan SIP sesuai standar
15. Jumlah puskesmas dengan persentase kelengkapan sarana puskesmas sesuai standar >80%
16. Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Index-API) per 1000 penduduk
17. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
18. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
19. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
20. Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%
21. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
22. Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak
23. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
24. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
25. Persentase tempat-tempat umum sehat
26. Jumlah Puskesmas yang memiliki 5 minimal jenis ketenagaan
27. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
28. Persentase desa siaga aktif

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan.

2. Jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan di lingkungan kabupaten Labuhanbatu mulai ada peningkatan meskipun tidak siginifikan
3. Tingginya komitmen dari segenap jajaran kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan paripurna.
4. Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat baik berupa dukungan dana maupun perhatian.
5. Adanya dukungan yang baik dari masyarakat untuk peningkatan sarana kesehatan di lingkungannya dan komitmen yang tinggi dari para pemangku jabatan terkait
6. Komitmen yang tinggi dari segenap jajaran kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat miskin.
7. Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat.
8. Dukungan dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dalam pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.
9. Keaktifan pelaksanaan Posyandu sebagai salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
10. Kebijakan dan pendanaan dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam hal pengawasan kualitas air minum.

Selanjutnya 29 indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :

1. Angka Harapan Hidup (tahun)
2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
5. Persentase ibu hamil medapatkan pelayanan ibu hamil
6. Persentase ibu bersalin medapatkan pelayanan ibu bersalin
7. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
8. Persentase anak usia 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
9. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
10. Persentase balita kurus yang mendapatkan tambahan makanan
11. Cakupan balita ditimbang berat badannya
12. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
13. Jumlah Puskesmas yang menerapkan BLUD
14. Persentase Puskesmas Pembantu dan Poskesdes dalam kondisi baik
15. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan standar
16. Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan standar
17. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
18. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar
19. Cakupan Desa kelurahan UCI
20. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

21. Persentase warga negara usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
22. Persentase RT yang ber PHBS (IKU)
23. Cakupan Desa siaga aktif (mandiri)
24. Persentase tempat pengolahan makanan sehat
25. Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
26. Persentase SDM Kesehatan Puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya (Dokter, Perawat, Bidan)
27. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
28. Jumlah Puskesmas dengan persentase kelengkapan peralatan kesehatan sesuai standar >80% (AKB)
29. Persentase apotek, toko obat, dan swalayan yang dibina

Tidak tercapainya target **Angka Harapan Hidup (UHH)** disebabkan oleh berbagai permasalahan pada setiap tahapan upaya kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan lansia. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para ibu akan pentingnya melakukan kontrol rutin sejak masa kehamilan sampai nifas serta terbatasnya akses dan mutu kepada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas berkontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih Masih kurangnya ketersediaan alat dan obat-obatan posyandu lansia.

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan penurunan, Jika dibandingkan dengan target sasaran Renstra Kemenkes RI 2020-2024 sebesar 16/1000KH, maka Kabupaten Labuhanbatu dapat dikatakan mencapai target, tetapi bila dibandingkan target Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 sebesar 1/1000KH maka belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 33%.

Lebih rinci disajikan data jumlah kematian bayi per kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bilah Barat	6	1	4	5	1
2	Rantau Utara	8	11	9	7	5
3	Rantau Selatan	4	9	7	6	7
4	Bilah Hulu	9	7	3	3	3
5	Pangkatan	5	4	2	2	6
6	Bilah Hilir	12	9	2	3	2
7	Panai Hulu	7	4	3	3	3

8	Panai Tengah	4	2	2	2	1
9	Panai Hilir	5	3	5	7	3
	Jumlah	60	50	37	38	31

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu 2016 - 2020

Jumlah kasus kematian bayi tahun 2020 sebanyak 31 kasus kematian bayi dengan penyebab kematian bayi adalah : BBLR 4 kasus, Asfiksia 9 kasus, Sepsis 3, dan lain –lain sebanyak 15 kasus. Dan setelah ditelusur terjadinya beberapa kasus tersebut karena : tingkat pengatahuan gizi ibu pada masa hamil yang masih kurang, masih rendahnya kualitas layanan KB Pasca Persalinan capaian tahun 2021 hanya mencapai 36,3% (3.931 ibu bersalin) dari jumlah ibu bersalin yang ada 10.841 ibu bersalin, kualtias saran dan prasarana fasilitas kesehatan kurang memadai, sistem rujukan belum optimal serta masih kurangnya pemberdayaan masyarakat menerapkan polah hidup sehat / germas.

Solusi untuk permasalahan di atas dapat diatasi dengan peningatkan edukasi kepada ibu agar ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan diri dan janin, meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan tidak hanya di rumah sakit, namun juga di tingkat primer, penguatan Supervisi Fasilitatif, AMP, Membangun jejaring rujukan serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peamnfaatan BUKU KIA, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Posyandu pemanfaatan dana desa, peran PKK perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulans desa , donor darah).

Tidak semua indikator **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Kesehatan Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mencapai target. Dari Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa didalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang memuat indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bahwa pada tahun 2020 dari total 12 indikator SPM Bidang Kesehatan, hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target 100% yaitu Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sedangkan 11 indikator lainnya belum mencapai target SPM 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja SPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 hampir mencapai target 2021. Khusus Cakupan pencapaian indikator kinerja SPM Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2020 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.18
Hasil Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	REALISASI PENCAPAIAN TARGET				
			2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	81,36	84,44	90,89	89,94	84,60
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	80,89	81,96	89,39	91,62	91,18
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	93,97	97,66	93,74	94,66	93,08
Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar /Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	96,60	88,57	87,60	73,03	91,71
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100,00	98,73	25,60	100,00	21,55
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	NA	2,46	15,60	10,78	56,70
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100	73,52	62,27	64,10	73,59	70,59
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	1,16	92,83	10,00	6,68	45,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	NA	100,00	84,00	39,20	86,80
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	NA	100	NA	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	NA	NA	100,00	63,58	32,35
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan standar	100	NA	NA	53,52	51,86	24,40

Permasalahan belum mencapai target SPM Nasional maupun Kabupaten (100%) untuk Persentase ibu hamil medapatkan pelayanan ibu hamil yang dilihat dari K4, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Persentase ibu bersalin medapatkan pelayanan ibu bersalin, Persentase anak usia 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase warga negara usia 60 tahun ke

atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan, Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan standar, Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan standar, Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar dan Persentase warga negara usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar serta indikator pendukung layanan SPM Persentase persalinan di fasilitas kesehatan adalah :

- Terjadinya wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan pelayanan SPM tidak optimal
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu hamil dalam pentingnya memeriksakan diri ke petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dan kurang aktifnya petugas kesehatan dalam mempromosikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan tiap semester kehamilan hingga proses persalinan
- Masih adanya persalinan yang dibantu oleh dukun beranak, masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu bersalin dalam pentingnya memeriksakan diri ke petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan setelah melaksanakan persalinan. Kurang aktifnya petugas kesehatan dalam melaksanakan Home Visite pada ibu yang selesai melakukan proses persalinan
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran ibu akan KB Pasca peralinan menyebabkanrendahnya cakupa KB Pasca persalinan
- Masih rendahnya kegiatan Home Visite oleh petugas kesehatan menyebabkan kegiatan jumlah Kunjungan Neonatus Lengkap sulit untuk mengalami kenaikan.
- Tingkat pengetahuan ibu yang masih rendah terhadap pemanfaatan Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam memeriksakan anak Balita dan kurang maksimalnya kegiatan kunjungan rumah.
- Kurangya kesadaran dari penduduk usia lanjut untuk memeriksakan kesehatannya, Kegiatan PERKESMAS masih belum terlaksana dengan maksimal menyebakan rendahnya pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah yang didalamnya terdapat lansia menjadi salah faktor terbesar indikator pelayanan kesehatan lansia tidak tercapai 100%.
- Sistem rujukan yang masih lemah
- Kompetensi tenaga dalam memberikan layanan SPM sepenuhnya berkualitas
- Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan masih belum memadai termasuk penyediaan BHP pelayanan penyakit tidak menular
- Pelayanan SPM yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas
- Adanya bayi baru lahir, ibu hamil, ibu bersalin, balita serta penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan diluar wilayah kerja Kabupaten.
- Partisipasi dan akses Laki-laki dan perempuan masih dalam mendapatkan layanan kesehatan kurang berimbang

Meningkatkan **status gizi masyarakat khususnya balita** merupakan upaya prioritas yang telah dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2016-2020. Kendati demikian permasalahan gizi masyarakat terutama pada balita masih banyak ditemukan antara lain gizi buruk, gizi kurang seperti underweight, wasting, stunting dan defisiensi mikronutrien. Sementara hasil Riskesdas tahun 2018 untuk tingkat Nasional ditemukan sebanyak 30,8% balita tergolong stunting, sedangkan provinsi Sumatera Utara sebedar 32,3% sedangkan untuk Labuhanbatu sebear 36,37%, angka ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan angka Nasional dan angka Propinsi. Sedangkan berdasarkan data EPPGBM hasil pengukuran tahun 2020 jumlah balita stunting sebanyak 528 balita dengan persebaran terbanyak di Panai Tengah dan Bilah Hilir dan jumlah kasus gizi buruk sebanyak 36 kasus. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 hasil menunjukkan prevalensi balita stunting Labuhanbatu menunjukkan penurunan menjadi 27%.

Setiap tahunnya pemerintah kabupaten Labuhanbatu telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak balita gizi kurang, pemantauan deteksi dini tumbuh kembang balita di posyandu-posyandu, peningkatan pengetahuan ibu dan masyarakat tentang gizi seimbang, dan masih banyak lagi upaya lainnya yang telah dilakukan.

Tiga indikator gizi yang diprioritaskan untuk menurunkan prevalensi stunting anatara lain Persentase balita kurus yang mendapatkan tambahan makanan, Cakupan balita ditimbang berat badannya, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Adanya wabah pandemi covid-19 menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan gizi tidak berjalan optimal mengakibatkan tiga indikator ini tidak mencapai target selain masih rendahnya promosi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian ASI pada bayi dan kelas ibu hamil sebagai persiapan untuk perawatan kesehatan selama kehamilan, nifas dan pelaksanaan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) dan masih kurangnya kesadaran ibu-ibu membawa anaknya ke Posyandu

Tabel 2.19
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 – 2021

No	Tahun	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
1	2016	0,64%
2	2017	2,91%
3	2018	4,62%
4	2019	1,45%
5	2020	9,05%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu 2016 – 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 0.64%, dan Hasil dari Pemantauan Status Gizi Tahun 2020 angka prevalensi balita gizi buruk

dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 9,05%. Angka ini jika dibandingkan dengan standar WHO; 5-9% rendah, 10-19% sedang/medium, 20-39% tinggi, >40% sangat tinggi, maka prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Labuhanbatu berada pada kategori rendah. Walau demikian hal ini akan menjadi fokus prioritas ke depan Program Pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan masalah gizi masyarakat terutama pada anak balita termasuk peningkatan PHBS menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dimasyarakat.

. Upaya penurunan stunting dan permasalahan gizi masyarakat tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring progam.

Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan *Home sweeping* di Puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus dan masih kurang optimalnya pelaksanaan dan pengawasan imunisasi merupakan peyebab masih belum tercapainya target desa keluarahan UCI.

Keterbatasan anggaran dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan peningatan komptensi sumber daya manusia kesehatan juga merupakan factor penyebab tidak tercapai target Puskesmas yang menerapkan BLUD, Persentase Puskesmas Pembantu dan Poskesdes dalam kondisi baik, Persentase tempat pengolahan makanan sehat, Persentase SDM Kesehatan Puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya, Jumlah Puskesmas dengan persentase kelengkapan peralatan kesehatan sesuai standar >80%.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulans. Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

Peserta jaminan kesehatan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBUP)/ Mandiri dan Bukan Pekerja (BP). Jumlah kepesertaan JKN Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 248.138 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 137.499 jiwa, PBI APBD 19.173 jiwa, PPU 37.232 jiwa dan PBUP/Mandiri sebanyak 49.573 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.661 jiwa. Sehingga berdasarkan data tersebut persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk penduduk

Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu baru mencapai 50,24%. Persentase ini Jika dibandingkan dengan target Nasional 2020 95% maka capaian masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu kedalam sistem jaminan kesehatan nasional melalui konversi jamkesda secara bertahap ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional-KIS.

Puskesmas Akreditasi adalah puskesmas yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai standar yang telah ditetapkan melalui proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi yang ditandai dengan adanya sertifikat akreditasi.

Akreditasi Puskesmas adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas yang terakreditasi. Untuk Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2020 seluruh Puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi madya sebanyak 4 Puskesmas (Janji, Kota Rantauprapat, Sigambal, dan Sei Penggantungan) dan status akreditasi dasar sebanyak 11 Puskesmas (Tanjung Haloban, Teluk Sentosa, Labuhan Bilik, Sei Berombang, Negeri Lama, Gunung Selamat, Perbaungan, Pangkatan, Suka Makmur, Lingga Tiga, dan Perlayuan).

Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Fasilitas kesehatan ke depan upaya utama yang harus dilakukan adalah adalah dengan meningkatkan status akreditasi Puskesmas mengingat kondisi status akreditasi puskesmas masih sebagian besar (73,33%) berstatus akreditasi dasar.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Urusan kesehatan merupakan unsur pemrintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Selain APBD Kabupaten Labuhanbatu, sumber daya keuangan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten dan jajarannya juga berasala dari dan transfer daerah serta pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2020 proporsi pembiayaan kesehatan yang paling tinggi bersumber bersumber dari APBD Kabupaten (94,22%), disusul dari APBN (5,75%) dan PHLN (0,03%).

Berdasarkan ketetapan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Daerah, maka untuk Kabupaten Labuhanbatu besar alokasi anggaran untuk bidang kesehatan (Dinkes+RSUD) di luar gaji pada tahun 2020 baru mencapai 18,81% dari total APBD Daerah.

Dan pada tahun 2020 biaya kesehatan perkapita penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang dibiayai oleh pemerintah sebesar Rp. 569.493/kapita pertahun.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu termasuk RSUD dari tahun 2016 ke tahun 2020 dengan angka yang fluktuatif, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20. Alokasi Anggaran APBD Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 – 2020

NO.	TAHUN	APBD KAB/KOTA	APBD KESEHATAN	PERSEN
1.	2016	1.391.675.322.792	258.458.916.309	**14,79%**
2.	2017	1.391.675.322.792	265.655.954.842	**14,18%**
3.	2018	1.386.434.351.725	253.586.206.909	**18,29%**
4.	2019	1.579.560.837.215	294.422.523.028	**18,64%**
5.	2020	1.409.550.711.425	265.111.687.417	**18,81%**

Catatan : Data termasuk anggaran Dinas Kesehatan+RSUD
Sumber : Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Labuhanbatu

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020 dirinci sebagi berikut:

Tabel 2.21. Alokasi Anggaran Belanja Langsung APBD Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020

No.	BELANJA LANGSUNG PER TAHUN	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	TAHUN 2016	50.617.939.221	37.080.166.272	**73,25**
2.	TAHUN 2017	61.496.221.600	35.169.560.516	**57,19**
3.	TAHUN 2018	52.100.983.261	40.607.405.781	**77,94**
4.	TAHUN 2019	55.196.006.850	38.335.606.781	**69,45**
5.	TAHUN 2020	59.169.229.656	47.423.206.751	**80,15**
	JUMLAH	**278.580.380.588**	**198.615.946.101**	**84,61**
	Rata-rata Realisasi Belanja Langsung selama 5 tahun			**71,60**

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) rata-rata realisasi Belanja Langsung Dinas Kesehatan yang dipergunakan untuk pembiayaan publik dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar 71,60%.

Pada table 2.22 menunjukkan bahwa untuk belanja daerah rasio antara realisasi dengan anggaran mengalami angka yang fluktuatif selama 5 (tahun)

terakhir, tahun 2016 ratio antara realisasi dengan anggaran sebesar 0.84 naik di tahun 2018 menjadi 0,94 tetapi mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 0,87. Jika dilihat dari jenis Belanja, rasio antara realisasi dengan anggaran lebih tinggi pada Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung. Tahun 2020 Ratio mencapai 0,93 pada Belanja Tidak Langsung sedangkan Pada Belanja Langsung hanya 0,80. Penyerapan anggaran yang cukup rendah disebabkan beberapa proyek pengadaan barang jasa yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan karena ketidaktersediaan dana dikas pemda, sehingga pembayaran akan dibawakan pada tahun berikutnya selain itu terdapat juga kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak cair pada tahun anggaran berkenaan yang juga dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dapat dianalisis berdasarkan Kinerja Keuangan periode Renstra 2016 - 2020. Dari Tabel 2.22 tergambar rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran Belanja Daerah mencapai 6,02% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten 8,12%.

Namun apabila diperhatikan Dari Jenis Belanja rata-rata pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Lansung atau dengan kata lain proporsi alokasi anggaran belanja banyak terserap untuk pemenuhan belanja pegawai (gaji dan TPP). Rata-rata pertumbuhan alokasi Anggaran Belanja Tidak langsung mencapai 9,23%, sementara rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran belanja langsung hanya mencapai 3,17% untuk pelayanan publik.

Dari gambaran di atas dapat juga disimpulkan bahwa APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah mulai mengarah pada Belanja Langsung untuk pembiayaan program/kegiatan kesehatan atau belanja intervensi langsung kepada masyarakat. Dan Selengkapnya Alokasi dan Realisasi Program Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.23.

Berdasarkan hasil Evaluasi Renstra 2016-2020 menunjukkan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu (2020) adalah sebesar 77,29% (tinggi) walaupun realisasi keuangan hanya sebesar 52,86% (rendah), sedangkan berdasarkan evaluasi tahun berjalan 2021, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra-PD s/d Tahun 2021 (%) adalah 81,29% (tinggi) dengan realisasi keuangan 73,01% (sedang).

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	**12,388,936,500**	**16,160,500,000**	**13,213,497,000**	**16,160,500,000**	**16,160,500,000**	**12,586,685,086**	**11,419,455,414**	**11,630,452,799**	**12,424,863,945**	**12,207,199,350**	**1.02**	**0.71**	**0.88**	**0.77**	**0.76**	**5.46%**	**-0.61%**
Pendapatan Asli Daerah	**12,388,936,500**	**16,160,500,000**	**13,213,497,000**	**16,160,500,000**	**16,160,500,000**	**12,586,685,086**	**11,419,455,414**	**11,630,452,799**	**12,424,863,945**	**12,207,199,350**	**1.02**	**0.71**	**0.88**	**0.77**	**0.76**	**5.46%**	**-0.61%**
- Hasil Retribusi Daerah	175,000,000.00	160,500,000	160,500,000	160500000	160,500,000	109,545,000	62,725,000	128,440,000	83,665,000	14,775,000	0.63	0.39	0.80	0.52	0.09	**-1.71%**	**-33.01%**
- Lain - lain PAD yang sah	12,213,936,500.00	16,000,000,000	13,052,997,000	16,000,000,000	16,000,000,000	12,477,140,086	11,356,730,414	11,502,012,799	12,341,198,945	12,192,424,350	1.02	0.71	0.88	0.77	0.76	**5.55%**	**-0.46%**
BELANJA DAERAH	**90,553,793,381**	**107,114,930,829**	**102,336,700,835**	**115,267,572,608**	**121,269,734,320**	**76,005,392,845**	**80,522,405,506**	**96,682,515,367**	**97,615,437,166**	**104,935,822,765**	**0.84**	**0.75**	**0.94**	**0.85**	**0.87**	**6.02%**	**6.66%**
Belanja Tidak Langsung	**39,935,854,160**	**45,618,709,229**	**50,235,717,574**	**60,071,565,758**	**62,100,504,664**	**38,925,226,573**	**45,352,844,990**	**56,075,109,586**	**59,279,830,385**	**57,512,616,014**	**0.97**	**0.99**	**1.12**	**0.99**	**0.93**	**9.23%**	**8.12%**
- Belanja Gaji dan Tunjangan	32,787,234,160	34,160,810,884	38,028,317,574	44,965,858,692	47,316,504,664	32,727,747,778	34,156,582,392	41,650,245,335	44,523,477,007	46,821,147,414	1.00	1.00	1.10	0.99	0.99	**7.61%**	**7.42%**
- Tambahan Penghasilan	7,148,620,000	11,457,898,345	12,207,400,000	15,105,707,066	14,784,000,000	6,197,478,795	11,196,262,598	14,424,864,251	14,756,353,378	10,691,468,600	0.87	0.98	1.18	0.98	0.72	**15.64%**	**11.52%**
Belanja Langsung	**50,617,939,221**	**61,496,221,600**	**52,100,983,261**	**55,196,006,850**	**59,169,229,656**	**37,080,166,272**	**35,169,560,516**	**40,607,405,781**	**38,335,606,781**	**47,423,206,751**	**0.73**	**0.57**	**0.78**	**0.69**	**0.80**	**3.17%**	**5.04%**
- Belanja Pegawai	1,796,586,700	176,715,000	2,003,865,000	3,451,859,000	31,443,000	1,565,328,900	28,375,000	1,603,641,250	2,270,706,000	22,358,000	0.87	0.16	0.80	0.66	0.71	**-55.47%**	**-57.25%**
- Belanja Barang dan Jasa	33,168,737,421	47,716,385,513	41,672,237,625	41,582,735,100	50,870,802,150	22,462,336,935	29,265,411,245	31,816,291,230	31,786,935,517	40,944,190,777	0.68	0.61	0.76	0.76	0.80	**8.93%**	**12.76%**
- Belanja Modal	15,652,615,100	13,603,121,087	8,424,880,636	10,161,412,750	8,266,984,506	13,052,500,437	5,875,774,271	7,187,473,301	4,277,965,264	6,456,657,974	0.83	0.43	0.85	0.42	0.78	**-11.99%**	**-13.13%**

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Program Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 - 2020

PROGRAM		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Langsung		50,617,939,221	61,496,221,600	52,100,983,261	55,196,006,850	59,169,229,656	37,086,868,955	35,169,560,516	40,607,405,781	38,335,606,781	47,423,206,751	0.73	0.57	0.78	0.69	0.80
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,151,149,900	2,139,757,610	2,077,893,000	2,395,082,700	5,401,219,700	1,797,334,285	1,842,629,631	1,817,739,152	2,102,575,112	4,375,827,745	0.84	0.86	0.87	0.88	0.81
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,585,293,900	1,879,339,600	2,740,029,700	2,296,473,500	2,078,746,000	3,308,995,129	1,188,907,595	2,476,111,577	2,284,449,498	1,950,546,200	0.92	0.63	0.90	0.99	0.94
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	320,000,000	92,671,800	-	-	-	201,525,000	91,996,800	-	-	-	0.63	0.99	-
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	226,450,000	226,450,000	185,262,500	203,450,000	35,000,000	159,615,400	191,485,056	149,801,950	202,705,000	34,550,000	0.70	0.85	0.81	1.00	0.99
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48,076,600	34,648,600	31,000,000	49,422,500	12,023,200	48,069,400	34,440,600	28,222,900	48,269,300	10,340,200	1.00	0.99	0.91	0.98	0.86
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	5,047,817,200	4,219,044,000	3,679,344,675	3,717,664,000	2,434,837,000	4,146,915,821	3,132,346,281	2,352,908,485	3,233,700,866	2,317,720,519	0.82	0.74	0.64	0.87	0.95
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23,025,505,621	33,131,030,800	24,996,144,200	28,016,430,350	34,755,662,594	13,802,562,689	15,973,245,958	21,443,954,364	20,120,729,370	25,929,605,788	0.60	0.48	0.86	0.72	0.75
8	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	20,000,000	23,000,000	23,000,000	30,000,000	209,388,700	20,000,000	23,000,000	23,000,000	27,825,000	140,598,600	1.00	1.00	1.00	0.93	0.67

PROGRAM		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	489,982,600	592,625,900	426,000,000	510,000,000	225,279,200	421,062,600	555,575,900	393,147,000	493,148,750	225,208,800	0.86	0.94	0.92	0.97	1.00
10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	790,600,000	370,820,290	545,000,000	1,157,384,000	998,456,156	479,079,950	325,611,400	244,580,350	1,134,814,300	932,795,340	0.61	0.88	0.45	0.98	0.93
11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	201,191,900	386,500,000	581,689,200	482,398,200	1,612,297,700	196,356,000	269,876,000	445,387,800	430,536,050	1,582,903,500	0.98	0.70	0.77	0.89	0.98
12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	674,915,100	1,962,897,900	1,467,999,600	1,215,986,800	2,077,755,900	644,297,100	1,911,749,200	921,700,200	1,049,395,641	1,917,947,249	0.95	0.97	0.63	0.86	0.92
13	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	746,047,700	1,818,127,400	1,846,044,900	1,427,050,050	1,362,744,400	646,637,892	963,474,780	869,687,016	1,100,812,535	652,809,100	0.87	0.53	0.47	0.77	0.48
14	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	370,000,000	840,000,000	550,000,000	300,000,000	619,142,100	353,076,700	811,179,850	270,240,000	289,523,800	617,241,300	0.95	0.97	0.49	0.97	1.00
15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	10,894,793,400	7,998,509,800	6,911,168,486	8,396,623,850	3,586,932,406	10,469,593,060	5,481,148,871	4,226,374,264	2,678,050,964	3,110,159,605	0.96	0.69	0.61	0.32	0.87
16	PROGRAM KEMITRAAN PELAYANAN KESEHATAN	-	200,000,000	211,900,000	186,900,000	203,380,100	-	185,487,500	181,981,500	186,825,000	185,800,000	-	0.93	0.86	1.00	0.91
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	-	67,600,000	75,000,000	62,330,500	35,000,000	-	67,597,200	43,735,000	55,170,500	35,000,000	-	1.00	0.58	0.89	1.00
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	24,878,500	137,600,000	130,000,000	138,410,500	38,400,000	24,878,500	137,600,000	126,000,000	134,540,500	20,000,000	1.00	1.00	0.97	0.97	0.52

PROGRAM		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN KESEHATAN MAKANAN	45,000,000	49,500,000	65,000,000	65,000,000	97,372,500	45,000,000	49,500,000	65,000,000	34,900,000	86,682,200	1.00	1.00	1.00	0.54	0.89
20	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	2,276,236,800	5,418,769,700	5,238,507,000	4,452,728,100	3,385,592,000	523,394,429	2,024,704,694	4,326,309,223	2,635,637,795	3,297,470,605	0.23	0.37	0.83	0.59	0.97

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan/Kendala

1. Kendala Eksternal

a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan, penyediaan rumah sehat, penyediaan kualitas air, pencmaran udara, penyediaan pangan dan penyedian fasilitas kesehatan.

b. Meningkatnya umur harapan hidup penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang mengakibatkan proporsi dengan usia lanjut semakin besar serta meningkatnya bonus demografi dimana jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia tidak produktif yang puncaknya diperkirakan tahun 2025.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu yang masih di bawah target indeks 80. IPM dipengaruhi Indeks Pendidikan (lama sekolah), Indeks Kesehatan (UHH), Ekonomi (daya beli masyarakat). Karenanya menjadi tantangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mencapai peningkatan IPM. Sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri.

d. Mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah di Kabupaten Labuhanbatu dan antar Kabupaten mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular meningkat misalnya HIV/AIDS, TB, Covid-19 dan DBD.

e. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu memiliki pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat misalnya merokok, mengkonsumsi junk food dan mengkonsumsi narkoba, hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya pada penyakit degeneratif /penyakit tidak menular misalnya Diabetes Miletus (DM), Kardiovaskuler dan kanker (keganasan).

f. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan berupa, pembuangan sampah /limbah pabrik pada aliran sungai, penggunaan pestisida yang tidak tepat yang pada akhirnya berdampak pada masalah kesehatan misalnya gangguan kesehatan terutama penyakit yang berbasis lingkungan. d. Perubahan iklim yang ekstrem sebagai dampak dari global warming mengakibatkan adanya mutasi virus beberapa penyakit seperti DBD dan siklus hidup vektor yang semakin cepat. Semakin luas daerah endemis DBD dan Chikungunya. Pada kejadian banjir yang semakin meluas dapat berdampak pada peningkatan kejadian penyakit diare, Ispa, kulit dan Leptospirosis.

g. Kesadaran masyarakat khususnya ibu bersalin yang masih rendah untuk KB pasca persalinan sehingga perlu penguatan lintas sektor dan kerjasama dengan masyarakat, tokoh agama,dan stake holder lainnya.

h. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal.
i. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu di daerah perbatasan berpotensi peningkatan penyakit menular.
j. Masih ada budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program kesehatan. Misalnya dalam menolak imunisasi, pantang makanan tertentu baik pada ibu hamil maupun saat menyusui, banyak anak banyak rejeki dan masih banyak yang lainnya.
k. Networking / jejaring penanganan masalah kesehatan dengan sektor terkait belum optimal. Pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan dan hubungan antara pelayanan kesehatan oleh pemerintah, swasta, dunia usaha dan sektor lain belum optimal. Pemecahan masalah kesehatan belum mengacu pada pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor, hal ini disebabkan pemahaman belum ada persamaan persepsi.
l. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing - masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan
m. Pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat publik dan perbekalan kesehatan yang bermutu di unit pelayanan obat dan perbekalan kesehatan pemerintah maupun swasta, belum sesuai dikarenakan sistem yang ada belum tertata secara optimal. Penyusunan dan pelaksanaan kerjasama antar lintas program (Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota), lintas sektor dan organisasi profesi terkait serta lembaga masyarakat, dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sejak dari produksi, distribusi sampai dengan pemanfaatannya, belum optimal. Disamping itu, masih ditemukan peredaran sediaan farmasi, makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan kesehatan.
n. Mutu, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional belum tertata secara optimal, baik mutu bahan baku, produksi serta pemanfaatan di sarana pelayanan kesehatan formal.
o. Standarisasi Mutu Pelayanan di Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta perlu diterapkan dengan baik bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Sehubungan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kerjasama dari Klinik yang dapat memberikan layanan yang bermutu. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan yang baik di Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu sarana kesehatan swasta yang bermutu menjadi tantangan untuk dapat memberi

kontribusi bagi kurangnya sarana dan prasarana layanan kesehatan Pemerintah.

p. Implementasi Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan daerah belum dilaksanakan optimal

2. Kendala Internal :

a. Kemampuan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan kurang sehingga banyak yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan misalnya dengan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah.
b. Kurangnya advokasi, sosialisasi, promosi/pemasaran program/kegiatan bidang kesehatan kepada stakeholders.
c. Belum optimalnya deteksi dini, surveilans dan penanganan ditingkat pelayanan Primer.
d. Tenaga yang kompeten masih kurang dan penempatan tenaga tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan serta kedisiplinan masih rendah.
e. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di berbagai tingkat administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
f. Layanan SPM tidak optimal diukur dari Pencapaian SPM terdapat 11 (sebelas) indikator yang belum mencapai target.
g. Penguatan Regulasi Peraturan Daerah bagi Peningkatan Jenis Pelayanan Kesehatan
h. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas dan Sarana Kesehatan Swasta. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas dengan Sarana Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas yang lebih baik menjadi tantangan untuk mendapatkan data layanan kesehatan yang terpadu dan menggambarkan tingkat kesehatan yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena selama ini data kewilayahan dari sarana kesehatan swasta belum semua dapat dilaporkan oleh Puskesmas

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, adalah:

1. Peluang Eksternal

a. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2), bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan, Dana Kapitasi dan CSR.

2) Perundangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Bidang Kesehatan yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) e, yang menyebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

3)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 128 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, ayat (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga, ayat (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

b. Terdapat dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Selanjutnya pada Ayat (4) yang berbunyi bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, dan salah satunya (pada point b) adalah kesehatan;

c. Terdapat komitmen global, regional dan nasional yang menyangkut masalah kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan. Program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals (MDGs)* yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan. *SDGs* memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan169 target. Salah satu tujuan SDGs adalah Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health* dan *Well-being).* Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Upaya pencapain target TPB/SDGs menjadi priortas dalam pembangunan, hal ini terlihat dari sinkronisasi indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Labuhanbatu.
d. Budaya gotong royong masih melekat pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sehingga masalah kesehatan dapat diatasi secara bersama. Budaya harus dipertahankan dalam bentuk program bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
e. Peluang peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, seminar, workshop,
f. Jejaring dengan pelayanan swasta pada pelayanan Rujukan
g. Adanya dukungan finansial dan sumber daya dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri.
h. PERDA nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
i. Terbitnya PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyahuti PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
j. Adanya penetapan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Daerah.
k. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah

l. Adanya dukungan dan kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program kesehatan
m. Diterapkan prinsip Good Governance
n. Adanya trend peningkatan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta.

2. Peluang Internal
a. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi (APBD), Pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus) maupun anggaran hibah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah (APBD).
   - Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui cara outsourching contoh tenaga cleaning service, satpam, tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya.
c. Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.
d. Keberadaan jaringan Puskesmas di setiap desa memberikan kemudahan masyarakat memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar.
e. Adanya Perda Kabupaten Labuhanbatu tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir , Bayi dan Anak

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2016-2021 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindakk lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari indikator umur harapan hidup yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh upaya-upaya kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta status gizi (stunting). Pencapaian AKI, AKB, stunting, rendahnya kepesertaan jaminan kesehatan serta tingginya angka kejadian kasus beberapa penyakit menular dan tidak menular serta beberapa indikator pembangunan kesehatan yang belum mencapai target masih menjadi permsalahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode 2021-2026. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

No.	Masakah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya status kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat	Rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terakit siklus hidup	- SPM kesehatan ibu, bayi, anak dan lansia masih belum sesuai standar - Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya ibu bersalin untuk KB

			Pasca Persalinan - Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) - Tingkat Pertisipasi, akses kemanfaaatan masyarakat Laki-laki dan Perempuan masih sangat kurang akan layanan kesehatan terutama layanan HIV, lansia dan usia produktif
		Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat	- Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani - Belum optimalnya pelaksanaan surveilans gzi - Lemahnya Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan masalah gizi
		Rendahnya akses akses sanitasi dan air bersih	- Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas kesehatan - Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan

			sanitasi sebagai kebutuhan
		Rendahnya Masyarakat berperilaku PHBS	- Kurangnya Advokasi, Promosi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor - Masih kurangnya Promosi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui Pembudidayaan Germas - Masih rendahnya UKBM yang aktif
2.	Akses dan Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar	Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan belum memenuhi standar	Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan fasilitas pelayanan belum sesuai standar/ ketentuan
		Masih rendahnya kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penganggaran premi PBI
		Masih rendahnya mutu layanan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan dan informasi kesehatan	- Sebagian besar Puskesmas masih berstatus akreditasi dasar - Fasilitas kesehatan rujukan masihbanyak yang belum terkareditasi - Kurangnya tenaga pendamping akreditasi FKTP di Kabupaten - Sistem pencatatan dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi online fasilitas

			kesehatan belum berjalan optimal - Masih lemahnya Pencatatan dan pelaporan rujukan pelayanan kesehatan puskesmas-rumah sakit
		Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata	- Perecanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal - Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan - Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan
3.	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	Masih rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular Tingginya kasus penyakit Menular dan tidak menular (TB,HIV, Hipertensi dan Diabetes Melitus) serta adanya wabah pandemic covid-19	- Belum optimalnya upaya penemuan dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular terutama faktor resiko terutama Tuberculosis, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus) - Belum optimalnya kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, imunisasi termasuk

		Cakupan UCI belum 100%	imunisasi covid-19 serta surveilans penyakit - Kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit masih kurang Masih ada penolakan masyarakat dan kesadaran masih rendah terhadap pemberian vaksin di beberapa kelompok tertentu,
4.	Belum akuntabelnya Tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Belum maksimalnya pelaksanaan sistem e-government dan reformasi birokrasi	Masih rendahnya kualitas tata kelola administrasi, perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah Masih kurangnya komitmen dan integritas SDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhabatu dituntut untuk mampu dan cakap dalam menjawab setiap tantangan dan mengadaptasi peluang yang yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pada pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongya, agar setiap program yang dilaksanakan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun

sesuai misi yang diemban. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024"

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

Berkarakter	:	Ditandai dengan Masyarakat Labuhanbatu yang memiliki sikap jujur, bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan, mengetahui hak dan kewajiban, disiplin, bekerja keras, percaya diri, mandiri, cinta sesame, berfikir logis dan inovatif, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan dan keragaman, memiliki nilai-nilai kebangsaan serta sikap-sikap positif lainnya. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional dan berkeadilan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan social budaya pada setiap tindakan dan perbuatannya.
Maju	:	Ditandai dengan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Peningkatan pembangunan dan kualitas infra struktur diberbagai bidang. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dibidanag ekonomi, Pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial lainnya. Kemajuan juga mencakup segala bidang baik bidang fisik, ekonomi, mental spiritual (berakhlakul kharimah) keagamaan, kebudayaan dan don fisik lainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera bahagia lahir dan batin
Sejahtera	:	Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Memperoleh fasilitas Pendidikan dan pelayanan kesehatansecar layak dan berkualitas. Terbukanya kesempatan kerja dan berwirausaha sehingga berpenghasilan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih dari sekedar kebutuhan hidup.

Misi dari Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah, melalaui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta insdustri kreatif

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan Kawasan

5. Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Dari kelima Misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melakukan telaah terhadap Misi pertama dan kedua untuk dapat mendukung pencapaian-pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rancanagan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 .

Tabel 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi	**: Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024**			
No.	**Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional	Belum optimalnya Tata pemerintahan, birokrasi dan akuntabilitas perangkat daerah	Pola pikir dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja SDM aparatur yang mempunyai kompetensi	Komitmen Pemerintah dalam pengembangan e-gorverment melalui pemanfaatan Kemajuan tekonologi informasi Komitmen pemerintah dalam

			Informasi Teknologi sangat terbatas Kemampuan manejemen dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah masih sangat kurang Komitemen dan integritas SDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih kurang	pelaksanaan Reformasi Birokrasi Diterapkan prinsip Good Governance
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terkait siklus hidup dan penyakit menular tidak menular Akses dan Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar Masih rendahnya kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Terjadinya Wabah penyakit Pandemi Covid-19 Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan, penyediaan rumah sehat, penyediaan kualitas air, pencemaran udara, penyediaan pangan dan penyedian fasilitas kesehatan Kompetensi	Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Permedagri 100 tentang Penerapan SPM Permenkes 4 tahun 2019 tentang juknis SPM kesehatan Perda nomor 2 tantang Inovasi Daerah Perda Nomor 30/2019 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak Adanya trend

		Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	SDM kesehatan masih belum standar Masih kurangya inovatif dan kretifitas dalam pelaksanaan program kegiatan Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, rentan dan beresiko tinggi kesehatan yang memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan belum memenuhi standar Masih lemahnya sistem Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan	peningkatan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Adanya penetapan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Daerah Adanya dukungan dan kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas diatur didalamnya peningkatan mutu layanan harus dilakukan akreditasi puskesmas Adanya Perbup Labuhanbatu Tentang Germas Adanya Perbup

			Perubahan ilkim dan ancaman bencana alam seperti banjir Sistem pencatatan dan pelaporan tidak optimal Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Masih rendahnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas kesehatan Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan Lemahnya Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam	Penanggulangan Stunting

			penanggulangan masalah gizi dan penyakit	

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) misi pembangunan presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

   Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi *(infant mortality rate*) merupakan indicator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project,* yang harus digarap dengan langkah-lagkah strategis, efektif dan efisien.
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

   Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan angka *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat, namun demikian pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalm kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment)*
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

   Sesuai dengan peta jalan kemnadirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industry bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri

Tujuan strategis yang ingin di capai Kementerian Kesehatan tahun 2020– 2024 sesuai Visi dan Misi tersebut diatas adalah :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Secara Umum, sasaran strategis dalam Pembangunan kesehatan 2020-2024, yaitu:

1. **Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup adalah :**
   a) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

2. **Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan adalah :**
   a) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

3. **Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah :**
   a) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

4. **Peningkatan sumber daya kesehatan adalah :**
   a) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
   b) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
   c) Terjaminnya pembiayaan kesehatan.

5. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif adalah :**
   a) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
   b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan social, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan social mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan social, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olahraga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Tabel 3.3.
Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terakit siklus hidup Rendahnya cakupan layanan KB Pasca Persalinan Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat Rendahnya akses akses sanitasi dan air bersih Rendahnya Masyarakat berperilaku PHBS	Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan, penyediaan rumah sehat, penyediaan kualitas air, pencmaran udara, penyediaan pangan dan penyedian fasilitas kesehatan Kompetensi SDM kesehatan masih belum standar Masih kurangya inovatif dan kretifitas dalam pelaksanaan program kegiatan Kualitas dan kuantitas fasilitas	Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Permedagri 100 tentang Penerapan SPM Permenkes 4 tahun 2019 tentang juknis SPM kesehatan Perda Nomor 30/2019 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak Adanya Perbup Labuhanbatu Tentang Germas Adanya Perbup Penanggulangan Stunting Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten

			kesehatan belum memenuhi standar Masih lemahnya sistem rujukan pelayanan kesehatan Perubahan ilkim dan ancaman bencana alam seperti banjir Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Masih rendahnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas kesehatan Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan	pencapaian Indikator TPB

			Lemahnya Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan masalah gizi dan penyakit	
2.	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan belum memenuhi standar Masih rendahnya mutu layanan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan	Anggaran APBD untuk pemenuhan Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan terbatas Masih lemahnya sistem rujukan pelayanan kesehatan Sebagian besar Puskesmas masih berstatus akreditasi dasar Masih ada RS yang belum melakukan melaksanakan akreditasi puskesmas	Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten peningkatan Kualitas Puskesmas dan kuantitas Puskesmas sebagaimana tertuang dalam RTRW dan KLHS Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas diatur didalamnya peningkatan mutu layanan harus dilakukan akreditasi puskesmas
3.	Meningkatnya pencegahan dan	Masih rendahnya cakupan	Anggaran APBD terbatas	Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten

	pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	layanan SPM kesehatan terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular Tingginya kasus penyakit Menular dan tidak menular terutama TB,HIV, Hipertensi dan Diabetes Melitus	Masih kurangnya kemampuan petugas dalam deteksi dini dan surveilans penyakit Masih terbatasnya Ketersedian BHP pengendalian penyakit	pencapaian Indikator TPB Regulasi yang telah lengkap untuk mendukung pelaksanaan SPM
4.	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Masih rendahnya persentase puskesms dengan kelengkapan alat kesehatan >70%	Anggaran APBD terbatas Update data ASPAK puskesmas masih belum optimal	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas diatur didalamnya peningkatan mutu layanan harus dilakukan akreditasi puskesmas, standar kelengkapan alat kesehatan Adanya Dukungan Dana DAK Fisik Adanya penetapan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Daerah
5.	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan	Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum	Terbatasnya Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kompetensi	Adanya Dukungan Dana DAK Non Fisik

	kompetensi sesuai standar	merata , Masih rendahnya SDM kesehatan yang berkompeten	petugas Banyak pegawai yang rangkap tugas Adaya rotasi/mutasi pegawai yang begitu cepat Masih terdapatnya SDM kesehatan yang belum memiliki STR	Adanya regulasi yang memperkenankan untuk merektrut tenaga yang belum terpenuhi
6.	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Masih rendahnya kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Masih rendahnya Kesadaran masyarakat yang mampu untuk mendaftar sebagai peserta mandiri JKN Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, rentan&beresiko tinggi kesehatan yg memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan. Anggaran APBD terbatas	Adanya DBH-CHT, Pajak Rokok dan Dukungan dari Pemerintah pusat dan sumber lain yang tidak mengikat
7.	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Dibatasinya koordinasi dan kosultasi ke pusat Komitmen dan Pemahaman	Adanya koordinasi secara virtual dari Kementerian Adanya Komitemen Pemerintah

	yang baik dan bersih		pegawai yang masihkurang tentang tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Kabupaten untuk menerapkan *good governance*
8.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Masih Rendahnya ketepatan waktu dan kualitaas pelaporan melalui system informasi online puskesmas	Kemauan dan Kemampuan petugas masih kurang untuk pelaporan tepat waktu dan berkualitas Sistem pencatatan dan pelaporan tidak optimal	Tersedianya aplikasi pelaporan online dari Kementerian dan Kabupaten

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang disusun juga harus selaras dengan Renstra Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapain Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni **" Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat "**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut**,** maka ditetapkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah,

penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kesehatan ibu dan anak.
2. Meningkatnya status gizi masyarakat.
3. Menurunnya angka kesakitan.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsu Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak.
3. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat.
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
6. Meningkatkan perilaku hidup sehat.
7. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.
8. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
9. Meningkatkan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
10. Menigkatkan mutu tenaga kesehatan.
11. Meningkatkan kebijakan dan manajemen kesehatan.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dicantumkan arah kebijakan pembangunan kesehatan Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan secara bertahap dan terukur sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
2. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin (Catin) dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)
3. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sector dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
4. Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
5. Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak
6. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sector dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonata), bayi, balita, dan anak
7. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)
8. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi masyarakat
9. Peningkatan pendidikan gizi
10. Peningkatan surveilans gizi

11. Peningkatan suplemen gizi
12. Penguatan surveilans dan karantina kesehatan serta penanggulangan wabah dan bencana
13. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan jiwa
14. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan Fasilitas pelayanan kesehatan
15. Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di seluruh desa/kelurahan
16. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan
17. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
18. Peningkatan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
19. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar,rujukan, dan laboratorium kesehatan
20. Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dan penguatan *Public Safety Center* (PSC)
21. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22. Penyediaan dukungan layanan medis bergerak (dokter terbang, bis medis)
23. Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut
24. Peningkatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
25. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan mutu kefarmasian, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
26. Optimalisasi Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
27. Perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan SDM Kesehatan
28. Peningkatan kualitas institusi penyelenggara pelatihan kesehatan
29. Penguatan perencanaan, monitoring evaluasi, dan pengendalian
30. Peningkatan tata kelola Sistem Informasi Kesehatan dan Informasi public, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
31. Peningkatan humas dan hokum kesehatan
32. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/lintas sector dalam pembangunan kesehatan

Berikut disajikan Telaahan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 3.4.
Telaahan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

No.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Masih rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terakit siklus hidup Masih tingginya Angka Kematian ibu dan Bayi Rendahnya cakupanKB Pasca Persalinan Partisipasi dan akses masyarakat laki-lakidan perempuan masih kurang akan mendapatkan layanan kesehatan	Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan kesehatan lingkungan, penyediaan rumah sehat, penyediaan kualitas air, pencemaran udara, penyediaan pangan dan penyedian fasilitas kesehatan Kompetensi SDM kesehatan masih belum standar Masih kurangya inovatif dan kretifitas dalam pelaksanaan program kegiatan Kualitas dan kuantitas	Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Permedagri 100 tentang Penerapan SPM Permenkes 4 tahun 2019 tentang juknis SPM kesehatan Perda Nomor 30/2019 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak Adanya Perbup Labuhanbatu Tentang Germas Adanya Perbup Penanggulangan Stunting Adanya komitmen Pemerintah

			fasilitas kesehatan belum memenuhi standar Masih lemahnya sistem rujukan pelayanan kesehatan Lemahnya komitmen dan Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam Penurunan AKI dan AKB melalui penguatan advokasi KB Pasca Persalinan, penanggulangan masalah gizi dan penyakit	Kabupaten pencapaian Indikator TPB
2.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat	Tidak optimalnya pelaksanaan surveilans gizi Anggaran APBD terbatas Masih rendahnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk	Adanya Perbup Labuhanbatu Tentang Germas Adanya Perbup Penanggulangan Stunting Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Adanya Regulasi yang mengatur tentang STBM, Pokja Sanitasi Adanya Dukungan Dana

			menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan Belum optimalnya pengelolaan limbah medis fasilitas kesehatan	DAK Non Fisik
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Masih rendahnya cakupan layanan SPM kesehatan terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular Tingginya kasus penyakit Menular dan tidak menular (TB,HIV, Hipertensi dan Diabetes Melitus) Rendahnya Masyarakat berperilaku PHBS	Anggaran APBD terbatas Masih kurangnya kemampuan petugas dalam deteksi dini dan surveilans penyakit Masih terbatasnya Ketersedian BHP pengendalian penyakit Masih rendahnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Perubahan ilkim dan ancaman bencana alam seperti banjir Kualitas dan kuantitas	Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten pencapaian Indikator TPB Regulasi yang telah lengkap untuk mendukung pelaksanaan SPM Adanya Perbup Labuhanbatu Tentang Germas Adanya Komitmen Pemerintah

			fasilitas kesehatan belum memenuhi standar Masih rendahnya mutu layanan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan dan informasi kesehatan Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata Banyak pegawai yang rangkap tugas Adaya rotasi/mutasi pegawai yang begitu cepat Masih terdapatnya SDM kesehatan	Kabupaten peningkatan Kualitas Puskesmas dan kuantitas Puskesmas sebagaimana tertuang dalam RTRW dan KLHS Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas diatur didalamnya peningkatan mutu layanan harus dilakukan akreditasi puskesmas Adanya Dukungan Dana DAK Fisik Adanya penetapan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan diluar gaji sebesar 10% dari total APBD Daerah Adanya Dukungan Dana DAK Non Fisik yang memperkenankan untuk merektrut tenaga yang belum terpenuhi

			yang belum memiliki STR Masih rendahnya kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Masih rendahnya persentase puskesms dengan kelengkapan alat kesehatan >70% Anggaran APBD terbatas Update data ASPAK puskesmas masih belum optimal Masih rendahnya kepesertaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Masih rendahnya Kesadaran masyarakat yang mampu untuk mendaftar	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas diatur didalamnya peningkatan mutu layanan harus dilakukan akreditasi puskesmas, standar kelengkapan alat kesehatan Adanya DBH-CHT, Pajak Rokok dan Dukungan dari Pemerintah pusat dan sumber lain yang tidak terikat

			sebagai peserta mandiri JKN Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, rentan dan beresiko tinggi kesehatan yang memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan Masih Rendahnya ketepatan waktu dan kualitaas pelaporan melalui system informasi online puskesmas Masih kurangnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tersedianya aplikasi pelaporan online dari Kementerian dan Kabupaten Adanya koordinasi secara virtual dari Kementerian Adanya Komitemen Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan *good governance*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan

SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Perangkat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu, Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode waktu pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah kedua (2021-2025) untuk Utilitas umum yaitu melalui Program Pengembangan Kesehatan diprioritaskan pada Peningkatan Status Puskesmas diseluruh kecamatan. Hal ini sejalan dengan permasalahan atau kondisi yang dihadapi Dinas Kesehatan saat ini yaitu hanya 47% Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar dan dengan status akreditasi puskesmas sebagian besar masih berstatus akreditasi dasar, sehingga ke depan peningkatan kualitas puskesmas di seluruh kecamatan akan menjadi salah satu isu strategis dalam perencanaan ke depan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelakasanaan Kajian Lingkungna Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG"s), yang tertian dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan kedalam Rancangan RPJMD.

Isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Analisa indikator capaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta Analisa kondisi daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan non pertanian serta kerja sama dengan perguruan tinggi, swasta dan masyarakat dalam hal investasi
2) Melanjutkan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkwalitas
3) Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, promosi pola hidup sehat, serta tata kelola kesehatan, serta pengendalian penduduk
4) Peningkatan kwalitas lingkungan dan keanekaragaman hayati

5) Meningkatkan rumah layak huni serta menjamin ketersediaan air bersih dan peningkatan pengelolaan sanitasi.

Pada isu Strategis Ketiga KLHS terdapat 27 indikator yang harus dicapai pada periode 2021-2026, indikator tersebut antara lain :

1		ISU STRATEGIS 3	Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, promosi pola hidup sehat , tata kelola kesehatan serta pengendalian penduduk				
2	INDIKATOR						
	No.	No Indikator	Indikator	Baseline	r (Laju)	Thn 2026	Thn 2030
	1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	56,45	y =9,651x + 8,195	100	100
	2	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	11	y = 0,2686x + 9,715	13	14
	3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	10,688	y = 0,1946x + 9,715	11,856	12,634
	4	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	11,058	y = 0,262x + 9,7474	12,631	13,679
	5	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	10,506	y = 0,1348x + 9,832	11,315	11,854
	6	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	10,1	y = 0,0076x + 0,0625	14,6	17,7
	7	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	36,5	y = 0,0284x + 0,2225	53,5	64,9
	8	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	29,4	y = 0,0372x + 0,1075	51,7	66,6
	9	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	15	y = 15	15	15
	10	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	28,01	y = 28,01	28,01	28,01
	11	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	603	y = 1,5x +668,83	654	648
	12	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	13	y = 0,0024x + 0,1198	15	16

	No.	No Indikator	Indikator	Baseline	r (Laju)	Thn 2026	Thn 2030
	13	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	74	y = 0,0352x + 0,5681	96	110
	14	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,09	y = 0,02x - 0,03	0,19	0,27
	15	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	36,4	y = 0,0105x + 0,3047	42,8	47,8
	16	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	321	y = 42,143x + 67,705	573	742
	17	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,95	y = 0,079x + 3,34	2,47	2,16
	18	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	-	Tidak ada	-	-
	19	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	-	Tidak ada	-	-
	20	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	-	Tidak ada	-	-
	21	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	-	Tidak ada	-	-
	22	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	-	Tidak ada	-	-
	23	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	-	Tidak ada	-	-
	24	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	-	Tidak ada	-	-
	25	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	-	Tidak ada	-	-
	26	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	-	Tidak ada	-	-
	27	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	Tidak ada	-	-

Selanjutnya hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

No.	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (Isu Strategis TPB)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, promosi pola hidup sehat, serta tata kelola kesehatan, serta pengendalian penduduk -Terdapat 27 indikator TPB kesehatan yang belum mencapai target	- SPM kesehatan ibu, bayi, anak dan lansia masih belum sesuai standar - Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan belum memenuhi standar - Masih rendahnya mutu layanan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan dan informasi kesehatan - Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata - Gizi buruk	- Kompetensi tenaga kesehatan masih rendah - Sistem pencatatan dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi online fasilitas kesehatan belum berjalan optimal - Masih lemahnya Sistem rujukan pelayanan kesehatan puskesmas-rumah sakit - Keterbatasan anggaran pemerintah daerah - Masih rendahnya kesadaran dan	- Adanya Perda Penyelamatan Ibu Melahirkan dan bayi baru lahir - Komitmen yang tinggi dari Tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan - RTRW Kabupaten Labuhanbatu dengan program prioritas Pengembangan kesehatan melalui Peningkatan Status Kesehatan - Telah terbentuknya Tim Penerapan SPM Kabupaten

		dan stunting yang masih terjadi di masyarakat - Rendahnya Masyarakat berperilaku PHBS - Lemahnya tata kelola sub sistem kesehatan	kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Masih kurangnya kemamampuan pegawai dalam tata kelola sub sistem kesehatan - Tidak ada ketersediaan data untuk beberapa indikator TPB (sistem pelaporan belum tersedia)	Labuhanbatu - Jumlah Tenaga kesehatan cukup besar difasilitas kesehatan - Adanya Perbup Penanggulangan Stunting - Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mecapai target Indikator TPB

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD serta kajian lingkungan strategis serta RPJPD 2005-2025, maka isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dapat dikelompokkan ke dalam 9 isu pokok yang wajib mendapat perhatian, yaitu :

1. Mempercepat status kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya kesehatan sesuai tahapan kehidupan (life cycle) secara berkesinambungan dengan memperhatikan kesetaraan gender akan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, perannya dalam pembangunan kesehatan serta penguatan layanan KB Pasca Persalinan
2. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar yang belum mencapai target standar pelayanan minimal
3. Peningkatan status gizi masyarakat serta penyehatan lingkungan.
4. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

5. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan dan pengembangan system informasi kesehatan
6. Peningkatan Jaminan Kesehatan melalui peningkatan kepesertaan penduduk Labuhanbatu dalam Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan
8. Percepatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

BAB

TUJUAN DAN SASARAN

4

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangakat Daerah

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasionalkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026 adalah: **Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Layanan Kesehatan,** Dengan Indikator Tujuan Yaitu Usia Harapan Hidup dan **Meningkatkan Tata Kelola, Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Tujuan Nilai hasil Evaluasi indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan.

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai 2 (dua) tujuan jangka menengah Sasaran Dinas Kesehatan, maka untuk Tujuan 1 (Satu) **Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat Dan Kualitas Layanan Kesehatan**, dengan indikator tujuan yaitu Usia Harapan Hidup maka sasaran pertama untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sehat dengan indikator sasaran : 1. Jumlah kematian ibu maternal; 2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; 3. Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek).

Sasaran kedua Meningkatnya Akses, Mutu Layanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dengan indikator sasaran : 1) Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC), 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pertama terakreditasi Madya, 3) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten.

Sasaran ketiga Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Insidensi Tuberculosis per 100.000 penduduk dan Prevalensi HIV/AIDS dari total Populasi.

Tujuan ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan Tata Kelola, Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator tujuan Nilai hasil Evaluasi indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan dengan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2020)	TARGET KINERJA SASARAN						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan untuk Membangun Karakter SDM yang produktif yang inovatif										
	TUJUAN : Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan										
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,93	69,93	69,95	69,97	69,98	70	70	70
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sehat	Jumlah kematian ibu maternal	Kasus	4	12	14	12	10	8	5	5
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	2,96	1	3	2	2	1	1	1
		Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	N/A	27	24	20	14	14	14	14

2	Meningkatnya Akses, Mutu Layanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta/Universal Health Coverage (UHC)	%	N/A	N/A	70	80	85	90	98	98
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pertama Terakreditasi Madya	%	N/A	N/A	26	33	46	60	66	66
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%	N/A	N/A	70	75	80	85	90	90
3	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	99,99	100	95	96	97	98	100	100
		Insidensi Tuberculosis per 100000 penduduk	/1000 penduduk	32,35	100	147	145	140	135	130	130
		Prevalensi HIV/AIDS dari total Populasi	%	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional										
	TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola, Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah										
		Nilai hasil Evaluasi indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	%	26	35	55	60	65	70	70	70

1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Hasil SAKIP Dinas Kesehatan (dari Inspektorat Daerah)	%	72,65	73	73	73,5	74	74,5	75	75

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021-2026 menjadi dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategi terkait urusan kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Labuhanbatu yaitu "Mewujudkan Kabupaten Cerdas dan mengembangkan Kawasan Pesisir Terpadu". Arah kebijakan perencanaanpembangunan pertahun Kabupaten Labuhanbatu dapat dijabarkan dengan tema-tema per tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2022 : Menciptakan Kabupaten Cerdas dalam Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Desa Inovatif Terintegrasi
2. Tahun 2023 : Membangun Kabupaten Cerdas dengan mewujudkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Kampung Nelayan Maju
3. Tahun 2024 : Menumbuhkan Kabupaten Cerdas melalui Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Panai Natural and Historical Park
4. Tahun 2025 : Mengembangkan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan Kawasan Pertanian Terintegrasi
5. Tahun 2026 : Melestarikan Kawasan Perkotaan Rantauprapat sebagai Kabupaten Cerdas untuk Pusat Kegiatan Perdagangan, Jasa, Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ramah lingkungan dan mengembangkan Kawasan Perhutanan Sosial.

Perencanaan Strategik Urusan Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 2 berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

MISI 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)
2.1. Meningkatkan akses dan kualitas mutu pendidikan serta pelayanan kesehatan yang prima	2.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan	2.2.1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi	2.2.1.1.1 Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi	1 Usia harapan hidup
			2.2.1.1.2 Percepatan perbaikan gizi untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi	
			2.2.1.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit	
			2.2.1.1.4. Penguatan Sistem Kesehatan	
			2.2.1.1.5 Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	

untuk membangun karakter SDM yang produktif yang inovatif.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Labuhanbatu pada Misi 2

			2.2.1.1.6 Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Keluarga Berencana		

Berikut ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Visi	**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024**			
Misi (1)	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan profesional**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Indikator Kinerja Outcome**
Meningkatnya Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				**Usia Harapan hidup**
	1. Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Peningkatan dan penguatan tata kelola, Birokrasi, pembiayaan kesehatan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (Dari Inspektorat Daerah)
			2. Peningkatan Kualitas dan tata kelola Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	
			3. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Barang Milik Daerah	
			4. Peningkatan kualitas layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
Misi (2)	**Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan**			

	kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	**Indikator Kinerja Outcome**
Meningkatkan Status kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan				
	1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sehat	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Percepatan perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, Reproduktif dan Lansia untuk UKM dan UKP Rujukan S	1. Jumlah Kematian Ibu Maternal 2. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 3. Prevalensi Balita Sunting
			2. Peningkatan upaya Gizi masyarakat dan penanggulangan Stunting	
			3. Peningkatan kualitas Lingkungan Sehat	
		2. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Germas dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Peningkatan Advokasi, Promosi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	
			2. Peningkatan Promosi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui Pembudidayaan Germas	
			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		3. Peningkatan Kualitas Pengawasan Makanan dan minuman sehat	1. Peningkatan dan penguatan pengawasan makanan dan minuman sehat	

	2. Meningkatnya Akses, Mutu Layanan Kesehatan dan sumberdaya kesehatan	1. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pelaksanaan JKN	1. Peningkatan kuantitas dan Kualitas Sarana, prasarana Alat Kesehatan	*1.* Persentase Vakupan Jaminan Kesehatan Semesta/*Universal Health Coverage (UHC)* 2. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Madya 3. Persentase Sumber daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten
			2. Peningkatan mutu Layanan Kesehatan Primer dan rujukan serta informasi kesehatan	
			3. Penyediaan dan dan pengawasan sediaan farmasi dan dan alat kesehatan	
		2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Penertiban dan pemberian izin praktik tenaga kesehatan	
			2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	
			3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	1. Peningkatan Pengendalian Penyakit	1. Peningkatan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Cakupan Desa Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization)* 2. Insidensi Tuberkulosis per 100000 penduduk 3. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi

.

5.1. Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026, terdapat Program Prioritas Kabupaten Labuhanbatu, yang dicapai melalui Kegiatan Strategis Daerah tahun 2022-2026 direncanakan untuk mencapai visi dan misi daerah, yang tentunya diharapkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan selama lima tahun kedepan. Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2026

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024									
1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional**									
		Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan Standar Pelayanan secara langsung dan Online di RSUD	Paket			1			
			Pemenuhan Standar Pelayanan secara langsung dan Online di Kantor Pencatatan Sipil	Paket		1				

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif**									
		Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Peningkatan Puskesmas Standar Nasional	Unit		1	1	1	1	
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yag Berbasis Teknologi Informasi	Pembangunan Sekolah Model Terpadu dan Berkharakter tingkat SD, SMP bertaraf nasional dan Internasional	Sekolah			1 SD, 1 SMP	1 SD, 1 SMP	1 SD, 1 SMP	
			Pembangunan Sport Center	Paket			1			
			Pemberian Beasiswa bagi Siswa/i dan Mahasiswa/I Berprestasi Kurang Mampu	Orang	100	100	100	100	100	
3	**Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM serta industri kreatif**									
		Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah Secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi untuk tanaman Padi di Kec. Panai Tengah dan Panai Hilir	Ha			10.000			
			Pemberian Benih Padi di Kec. Panai tengah dan Panai Hilir	Kg			250.000			

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pemberian Benih Ikan Lele	Benih	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	
			Pemberian Benih Ikan Nila	Benih		500.000	550.000	600.000	650.000	
			Pemberian Benih Ikan Mas	Benih		100.000	150.000	200.000	200.000	
			Pemberian Benih Ikan Gurami	Benih		550.000	600.000	650.000	700.000	
			Pemberian Bantuan Ternak Sapi	Ekor	30	40	50	60	70	
			Pemberian Bantuan Ternak Kambing/Domba	Ekor	25	50	750	100	125	
			Pemberian Bantuan Ternak Ayam	Ekor	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	
			Pemberian Bantuan Ternak itik	Ekor	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	
			Pembangunan Pasar Hewan di Kecamatan Bilah Hulu	Paket				1		
			Rehabilitasi TPI di Kecamatan Panai Hilir, Sei Berombang	Paket			1			
			Pembangunan Sentra UKM dan penerapan E-Market	Paket			1			

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pendirian BUMD Pengelolaan Pasar	Paket		1				
			Penataan dan Pembinaan Wisata Kuliner di Pusat Kota Rantauprapat	paket		1	1			
			Penataan Kota Tua untuk Peningkatan Pariwisata di Labuhanbilik	Paket			1	1		
			Pembangunan BLK di Kecamatan Rantau Selatan	Paket			1			
4	**Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna percepatan pengembangan wilayah dan kawasan**									
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Penambahan dan Pemeliharaan LPJU di Kota Rantauprapat	Paket	100	100	100	100	100	
			Pemeliharaan Priodik Jalan Kota Rantauprapat	Km	10	13	16	18	19	
			Pembangunan Kanalisasi Sungai Tahalak Simin	Paket	1	1	1			
			Pemeliharaan Sistem drainase Dalam Kota Rantauprapat	M	20.000	26.000	32.000	36.000	38.000	
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Unit	50	50	50	50	50	

No	Visi & Misi	Prioritas	Kegiatan strategis Daerah	Satuan	Target tahun ke -					Ket.
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan Akses Air Minum Layak	KK/SR	5.000	10.000	15.000	200	400	
			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	KK						
			Pembangunan TPA	Paket			1		1	
			Penambahan TPS3R	Paket		2	2	2	3	
			Penataan dan Pengolaan Bank Sampah	Paket	14	14	14	14	14	
			Peningkatan Jalan di Kawasan Pesisir	Km	10	15	20	25	40	
			Pengaspalan Jalan di Desa Janji - Aek Buru Selatan	Km		12				
5	**Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk**									
		Peningkatan Kerukunna dan Harmonisasi antar Umat Beragama.	Pembangunan Wisata Rohani di Mesjid Raya Rantauprapat	Paket		1				
			Rehabilitasi Rumah-rumah Ibadah Lainnya	Unit		100	120	130	140	

Dijabarkan lebih jelas Peningkatan Kualitas Puskesmas tersebut diarahkan sesuai Penetapan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Labuhanbatu yaitu Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan dansesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-203. 4 unit Puskesmas yang direncanakan untuk pengembangan sesuai Standar Nasional antara lain : Puskesmas Sigambal, Janji, Puskesmas Negeri Lama dan Puskesmas Kota Rantauprapat, dengan tidak mengenyampingkan puskesmas lain untuk dilakukan renovasi agar sesuai standar.

Untuk mendukung prioritas-prioritas tersebut selain dengan pendanaan melalui APBD juga diharapkan dapat melalui Non APBD seperti APBN, CSR, KPBU, Swasta, Pinjaman Daerah, dan lain-lain.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD;ll Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026 yang memuat visi, misi Kepala Daerah tujuan dan strategi sasaran rencana strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 2021-2026. Program-program Dinas Kesehatan 2021-2026 disesuaikan dengan program kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klassifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuagan Daerah. Program-program Dinas Kesehatan 2021-2026 dibagi dalam dua jenis, yaitu Program Pada Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Non Urusan, dengan uraian program kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM URUSAN

A.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan sasaran : meningkatnya kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, dan lingkungan sehat; meningkatnya ketersediaan, akses dan mutu fasyankes dasar dan rujukan; dan meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Indikator kinerja pada akhir tahun 2026 adalah :

a. Persentase capaian layanan SPM terkait siklus hidup, target 100%
b. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersedian Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar >70% , target 100%
c. Persentase capaian SPM bidang Kesehatan terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular, target 100%

Kegiatan Program ini meliputi :

No	Kegiatan	Sub kegiatan
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan puskesmas 2. Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3. Pengembangan Puskesmas 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan 7. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan

		8. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjamng medik fasilitas pelayanan kesehatan 9. Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi 10. Pengadaan obat, vaksin 11. Pengadaan bahan medis habis pakai 12. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan 13. Distribusi alat Kesehatan Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
2.	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	14. Pengelolaan layanan kesehatan ibu hamil 15. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin 16. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 17. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita 18. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 19. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut 20. Operasional pelayanan puskesmas 21. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 22. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 23. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 24. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 25. Penyelenggaraan kabupaten /kota sehat 26. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya 28. Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus 29. Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan 30. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota 31. Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) 32. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 33. Operasional Pelayanan Puskesmas 34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 35. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif 36. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

		37. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus 38. Jumlah penderita ODGJ yang dilayani sesuai standa 39. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 40. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 41. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) 42. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza 43. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) 44. Pengelolaan surveilans kesehatan 45. Peningkatan surveilans terpadu penyakit (STP) 46. Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan nasional 47. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah 48. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 49. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 50. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	51. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 52. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	53. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 54. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan 56. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

A.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan sasaran meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Indikator kinerja pada akhir tahun 2026 adalah :

1. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 60%

Kegiatan Program ini meliputi :

No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

A.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, dengan sasaran : meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman.

Indikator kinerja pada akhir tahun 2026 adalah :

1. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)yang memenuhi syarat sesiau standart, Target : 85%.
2. Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standart, target : 75%

Kegiatan Program ini meliputi :

No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
3	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	4. Pemeriksaan Post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan 5. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
5	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal (UMOT)	6. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
6	Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi	7. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga

	Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	

A.4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Indikator kinerja pada akhir tahun 2026 adalah :

1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kompeten, Target 95%.

Kegiatan Program ini meliputi :

No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 5. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM NON URUSAN

B.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja pada akhir tahun 2026 adalah :

1. Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan; target : 90%.

Kegiatan Program ini meliputi :

No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15. Sosialisasi Peraturan perundang-undanga 16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

		18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 22. Fasilitasi Kunjungan Tamu 23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Pengadaan Meubiler 26. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk lebih jelasnya, uraian dari bab ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 5.2 berikut :

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
	TOTAL PAGU											162,171,145,145		133,262,987,400		137,017,685,800		139,758,034,800		142,553,182,700		145,427,972,000		860,191,007,845		
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)										69,93 Tahun		69,95 Tahun		69,96 Tahun		69,98 Tahun		70,00 Tahun		70,00 Tahun		70,00 Tahun			
	Sasaran 1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sehat											24,419,319,900		13,765,448,285		14,042,126,000		14,322,970,000		14,609,428,800		14,901,617,000		96,060,909,985	DINKES	KABUPATEN LABUHNBATU
		Penurunan Jumlah Kematian Ibu Maternal,									14 Kasus		14 Kasus		12 Kasus		10 Kasus		8 Kasus		5 Kasus		5 Kasus			
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup,									3 Per 1000 KH		3 Per 1000 KH		2 Per 1000 KH		2 Per 1000 KH		1 Per 1000 KH		1 Per 1000 KH		1 Per 1000 KH			
		Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)									1.75%		1.50%		1.20%		1%		0.70%		0.50%		0.50%			
			1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Layanan SPM Terkait Siklus Hidup	78%	23,416,990,500	80%	13,139,033,985	82%	13,401,809,000	83%	13,669,846,000	84%	13,943,242,000	85%	14,222,108,000	85%	91,793,029,485	BIDANG KESMAS	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Layanan SPM yang Terkait Siklus Hidup yang dilaksanakan oleh Puskesmas	NA	21,105,457,700	6 Layanan	8,812,852,400	6 Layanan	8,989,105,000	6 Layanan	9,168,889,000	6 Layanan	9,352,265,000	6 Layanan	9,539,312,000	6 Layanan	66,967,881,100	SEKSI KESGA DAN GIZI, SEKSI KESLING	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	01	PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		388,873,500	100 %	2,148,486,900	15 Pusk	2,191,456,000	15 Pusk	2,235,285,000	15 Pusk	2,279,991,000	15 Pusk	2,325,591,000	15 Pusk	11,569,683,400	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	02	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	jumlah ibu hamil yang mendapat jaminan persalinan		4,052,923,300	3,500 Orang	1,845,185,800	15 Pusk	1,882,089,000	15 Pusk	1,919,731,000	15 Pusk	1,958,125,000	15 Pusk	1,997,288,000	15 Pusk	13,655,342,100	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU
										Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			100 %													
			1	02	02	2	02	03	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		216,900,000	100 %	711,311,300	15 Pusk	725,537,000	15 Pusk	740,048,000	15 Pusk	754,849,000	15 Pusk	769,946,000	15 Pusk	3,918,591,300	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	02	2	02	04	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita		372,699,800	8,535 Orang	607,480,200	15 Pusk	619,629,000	15 Pusk	632,022,000	15 Pusk	644,662,000	15 Pusk	657,556,000	15 Pusk	**3,534,049,000**	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU
										Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 %													
			1	02	02	2	02	05	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah anak sekolah dasar Kelas I,II dan V yang mendapatkan imunisasi BIAS DT,Td,dan MR pada Anak SD meningkat		173,100,000	21,606 Anak	1,029,757,300	15 Pusk	1,050,352,000	15 Pusk	1,071,359,000	15 Pusk	1,092,786,000	15 Pusk	1,114,642,000	15 Pusk	**5,531,996,300**	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU
										Persentase Anak Usia pendidikan dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			100 %													
			1	02	02	2	02	07	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		218,609,000	100 %	621,401,400	15 Pusk	633,829,000	15 Pusk	646,506,000	15 Pusk	659,436,000	15 Pusk	672,624,000	15 Pusk	**3,452,405,400**	SEKSI KESGA DAN GIZI	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan STBM		15,542,116,400	48 Desa	1,557,023,300	1 kegiatan	1,588,163,000	1 kegiatan	1,619,927,000	1 kegiatan	1,652,325,000	1 kegiatan	1,685,372,000	1 kegiatan	**23,644,926,700**	SEKSI KESGA DAN GIZI, PROMKES, DAN KESLING	KABUPATEN LABUHNBATU
										Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan UKM sesuai pedoman			15 Pusk													
										Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kebijakan germas			15 Pusk													
			1	02	02	2	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah jemaah haji yang diukur kebugaran jasmaninya		140,235,700	400 Orang	292,206,200	15 Pusk	298,050,000	15 Pusk	304,011,000	15 Pusk	310,091,000	15 Pusk	316,293,000	15 Pusk	**1,660,886,900**	SEKSI KESLING	KABUPATEN LABUHNBATU
										jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja			22 Sarana													
										jumlah tempat kerja yang melakukan pengukuran kebugaran jasmani			25 Sarana													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Balita Ditimbang (D/S)**	**55 %**	**1,290,659,500**	**58 %**	**2,229,351,200**	**60 %**	**2,273,938,000**	**65 %**	**2,319,416,000**	**75 %**	**2,365,805,000**	**85 %**	**2,413,121,000**	**85 %**	**12,892,290,700**	**SEKSI KESGA DAN GIZI**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak yang mendapat MP ASI dan PMT pemulihan		1,290,659,500	131 Anak	2,229,351,200	131 Anak	2,273,938,000	131 Anak	2,319,416,000	131 Anak	2,365,805,000	131 Anak	2,413,121,000	655 Anak	**12,892,290,700**		
										Jumlah kader posyandu terlatoh olah makanan panganl lokal			47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		235 Orang			
										Jumlah laporan data keluarga sadar gizi			2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		10 Laporan			
										Jumlah laporan monev EPPGBM dipuskesmas			2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		10 Laporan			
										Jumlah laporan penanggulangan stunting			6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		30 Laporan			
										Jumlah petugas kesehatan terlatih pengukuran tumbuh kembang balita			50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		250 Orang			
										Jumlah puskesmas dengan data EPPGBM lengkap			15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk			
										jumlah puskesmas yang melaskanakan surveilans gizi			15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk		15 Pusk			
										Jumlah regulasi stunting yang diterbitkan			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)**	**31 Desa/Keluraha n**	**571,059,200**	**35 Desa/Kel urahan**	**1,396,534,785**	**40 Desa/Kel urahan**	**1,424,465,000**	**45 Desa/Kel urahan**	**1,452,954,000**	**50 Desa/Kel urahan**	**1,482,013,000**	**55 Desa/Kelu rahan**	**1,511,654,000**	**55 Desa/Kelu rahan**	**7,838,679,985**	**SEKSI KESLING**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang dilakukan pemcuan		571,059,200	48 Desa/Kelu rahan	1,396,534,785	92 Desa/Kel urahan	1,424,465,000	95 Desa/Kel urahan	1,452,954,000	96 Desa/Kel urahan	1,482,013,000	98 Desa/Kelur ahan	1,511,654,000	98 Desa/Kelur ahan	**7,838,679,985**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
										jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM			94 Desa/Kelurahan		94 Desa/Kelurahan		94 Desa/Kelurahan		94 Desa/Kelurahan		94 Desa/Kelurahan		94 Desa/Kelurahan			
										jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standart			30 Sarana		30 Sarana		30 Sarana		30 Sarana		30 Sarana		150 Sarana			
										jumlah sarana air minum yang diawasi/yang diperiksa kualitas air minumnya sesuai standart			23,799 Sarana		23,799 Sarana		23,799 Sarana		23,799 Sarana		23,799 Sarana		23,799 Sarana			
										jumlah TTU yang dilakukan pengawasan sesuai standart			575 Sarana		575 Sarana		575 Sarana		575 Sarana		575 Sarana		575 Sarana			
			1	**02**	**02**				**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Terlaksananya Tatanan Kabupaten Kota Sehat**	**2 Tatanan**	**449,814,100**	**2 Tatanan**	**700,295,600**	**3 Tatanan**	**714,301,000**	**3 Tatanan**	**728,587,000**	**4 Tatanan**	**743,159,000**	**4 Tatanan**	**758,021,000**	**4 Tatanan**	**4,094,177,700**	**SEKSI PROMKES**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	peningkatan pelaksanaan germas dan PHBS dikecamatan		434,814,100	5 Kec	675,295,600	33 %	688,801,000	50 %	702,577,000	50 %	716,629,000	67 %	730,961,000	67 %	**3,949,077,700**		
										terlaksananya media promosi kesehatan			1 Paket													
										terlaksananya penyuluhan kesehatan melalui iklan radio dan media talk show			1 Paket													
										terlatihnya petugas promkes puskesmas			15 Orang													
			1	02	02	2	02	29	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten yang dibina	Na	15,000,000	4 Tatanan	25,000,000	1 kegiatan	25,500,000	1 kegiatan	26,010,000	1 kegiatan	26,530,000	1 kegiatan	27,060,000	1 kegiatan	**145,100,000**		
			1	**02**	**04**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standart**	**78 %**	**63,597,800**	**80.00 %**	**33,357,000**	**82 %**	**35,400,000**	**83 %**	**36,108,000**	**84 %**	**36,830,000**	**85 %**	**37,566,000**	**85 %**	**242,858,800**	**KABID KESMAS**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	**02**	**04**	**2**	**03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki rekomendasi laik Hygiene**	**NA**	**20,600,000**	**NA**	**-**	**52 %**	**-**	**61 %**	**-**	**78 %**	**-**	**100 %**	**-**	**100 %**	**20,600,000**	**SEKSI KESLING**	**KABUPATEN LABUHANBATU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021			2022			2023			2024			2025			2026			Target Akhir 2026			Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH		
			1	02	04	2	03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki rekomendasi laik Hygiene	NA		20,600,000	NA		-	52	%	0	61	%	-	78	%	-	100	%	-	100	%	**20,600,000**		
			1	**02**	**04**	**2**	**04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki rekomendasi laik Hygiene**	**NA**		**-**	**NA**		**-**	**52**	**%**	**15,000,000**	**61**	**%**	**15,300,000**	**78**	**%**	**15,606,000**	**100**	**%**	**15,918,000**	**100**	**%**	**61,824,000**	**SEKSI KESLING**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	02	04	2	04	01	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki rekomendasi laik Hygiene	NA		-	NA		-	52	%	15,000,000	61	%	15,300,000	78	%	15,606,000	100	%	15,918,000	100	%	**61,824,000**		
			1	**02**	**04**	**2**	**05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standart**	**75**	**%**	**13,357,000**	**80**	**%**	**13,357,000**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**26,714,000**		
			1	02	04	2	05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi sesuai standart yang sudah dikeluarkan rekomendasi laik higiene	188	Sarana	13,357,000	50	Sarana	13,357,000	575	Sarana	-	575	Sarana	-	575	Sarana	-	575	Sarana	-	575	Sarana	**26,714,000**		
			1	**02**	**04**	**2**	**06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendpat pengawasan sesuai standart**	**50**	**%**	**29,640,800**	**55**	**%**	**20,000,000**	**65**	**%**	**20,400,000**	**75**	**%**	**20,808,000**	**85**	**%**	**21,224,000**	**95**	**%**	**21,648,000**	**95**	**%**	**133,720,800**	**SEKSI KESLING**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	02	04	2	06	01	Pemeriksaan Post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang diawasi dengan standart yang belum dikeluarkan rekomendasi laik higiene	10	Sarana	29,640,800	100	Sarana	20,000,000	100	Sarana	20,400,000	100	Sarana	20,808,000	100	Sarana	21,224,000	100	Sarana	21,648,000	100	Sarana	**133,720,800**		
			1	02	04	2	06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	jumlah Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			-			-	1	DOK	20,000,000	1	DOK	20,400,000	1	DOK	20,808,000	1	DOK	21,224,000	1	DOK	**82,432,000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**53 %**	**938,731,600**	53 %	**593,057,300**	**54 %**	**604,917,000**	**55 %**	**617,016,000**	**57 %**	**629,356,800**	**60 %**	**641,943,000**	**60 %**	**4,025,021,700**	**BIDANG KESMAS**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	**02**	**05**	**2**	**01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas**	**NA Kec**	**834,431,600**	**2 Kec**	**217,497,400**	**4 Kec**	**221,847,000**	**6 Kec**	**226,284,000**	**8 Kec**	**230,809,900**	**9 Kec**	**235,426,000**	**9 Kec**	**1,966,295,900**	**SEKSI PROMKES**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penguatan dan pendampingan Germas	- -	834,431,600	9 Kec	217,497,400	1 kegiatan	221,847,000	1 kegiatan	226,284,000	1 kegiatan	230,809,900	1 kegiatan	235,426,000	1 kegiatan	**1,966,295,900**		
										Jumlah sekolah yang mendapatkan penguatan dan pendampingan germas			20 sekolah													
			1	**02**	**05**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Hari Kesehatan Nasional**	**1 keg**	**-**	**1 keg**	**236,915,100**	**1 keg**	**241,653,000**	**1 keg**	**246,486,000**	**1 keg**	**251,416,000**	**1 keg**	**256,444,000**	**5 keg**	**1,232,914,100**	**SEKSI PROMKES**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	02	05	2	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	terlaksananya peringatan hari kesehatan nasional	- -	-	1 kegiatan	236,915,100	1 kegiatan	241,653,000	1 kegiatan	246,486,000	1 kegiatan	251,416,000	1 kegiatan	256,444,000	1 kegiatan	**1,232,914,100**		
			1	**02**	**05**	**2**	**03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu yang dbina**	**15 %**	**104,300,000**	**19 %**	**138,644,800**	**39 %**	**141,417,000**	**58 %**	**144,246,000**	**78 %**	**147,130,900**	**100 %**	**150,073,000**	**100 %**	**825,811,700**	**SEKSI PROMKES**	**KABUPATEN LABUHANBATU**
			1	02	05	2	03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah kader posyandu yang menerima trasport kader	- -	104,300,000	1100 kader	138,644,800	210 posyandu	141,417,000	315 posyandu	144,246,000	420 posyandu	147,130,900	541 posyandu	150,073,000	541 posyandu	**825,811,700**		
										jumlah posyandu penerima pmt posyandu			220 posyandu													
										kader yang terlatih dalam revitalisasi posyandu			240 orang													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
	SASARAN 1.2 : MENINGKATKANYA AKSES, MUTU LAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN											**50,294,243,736**		**39,975,780,110**		**41,863,371,000**		**42,700,639,800**		**43,554,646,900**		**44,449,466,000**		**262,838,147,546**	**DINKES**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC)									**65%**		**70%**		**80%**		**85%**		**90%**		**98%**		**98%**			
		Persentase Fasilitas Kesehatan Pertama terakreditasi Madya									**20%**		**26%**		**33%**		**46%**		**60%**		**66%**		**66%**			
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten									**65.00%**		**70.00%**		**75.00%**		**80%**		**85.00%**		**90.00%**		**90.00%**			
			1	**02**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**	**84 %**	**2,103,500,000**	**85 %**	**2,050,000,000**	**87 %**	**2,091,000,000**	**89 %**	**2,132,820,000**	**90 %**	**2,175,475,000**	**95 %**	**2,218,982,000**	**95 %**	**12,771,777,000**	**BIDANG SDK**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	**02**	**03**	**2.01**			**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase praktik tenaga kesehatan yang berizin**	**50 %**	**-**	**60 %**	**40,000,000**	**65 %**	**40,800,000**	**70 %**	**41,616,000**	**75 %**	**42,448,000**	**80 %**	**43,296,000**	**80 %**	**208,160,000**	**SEKSI SDM**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	03	2.01	01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah praktik tenaga kesehatan yang memiliki izin yang dibina	34 praktik	-	34 praktik	25,000,000	36 praktik	25,500,000	38 praktik	26,010,000	40 praktik	26,530,000	42 praktik	27,060,000	190 praktik	**130,100,000**		
			1	02	03	2.01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Praktik tenaga kesehatan berizin yang memberikan layanan sesuai standar	34 praktik	-	34 praktik	15,000,000	36 praktik	15,300,000	38 praktik	15,606,000	40 praktik	15,918,000	42 praktik	16,236,000	190 praktik	**78,060,000**		
			1	**02**	**03**	**2.02**			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif**	**2 Pusk**	**1,806,000,000**	**4 Pusk**	**1,860,000,000**	**6 Pusk**	**1,897,200,000**	**8 Pusk**	**1,935,144,000**	**10 Pusk**	**1,973,846,000**	**15 Pusk**	**2,013,322,000**	**15 Pusk**	**11,485,512,000**	**SEKSI SDM**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	03	2.02	01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersusunnya dokumen Rencana kebutuhan Tenaga kesehatan	1 dokumen	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,500,000	1 dokumen	26,010,000	1 dokumen	26,530,000	1 dokumen	27,060,000	5 %	**130,100,000**		
			1	02	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Kecukupan Sumber Daya Manusia di puskesmas	91 %	1,800,000,000	91 %	1,820,000,000	92 %	1,856,400,000	93 %	1,893,528,000	94 %	1,931,398,000	95 %	1,970,026,000	95 %	**11,271,352,000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	03	2.02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah frekuensi pembinaan SDMK Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	4 Kali	6,000,000	4 Kali	15,000,000	4 Kali	15,300,000	4 Kali	15,606,000	4 Kali	15,918,000	4 Kali	16,236,000	20 Kali	**84,060,000**		
			1	**02**	**03**	**2.03**			**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**84 %**	**297,500,000**	**85 %**	**150,000,000**	**86 %**	**153,000,000**	**87 %**	**156,060,000**	**88 %**	**159,181,000**	**90 %**	**162,364,000**	**90 %**	**1,078,105,000**	**SEKSI SDM**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kompetensinya	35 orang	297,500,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	153,000,000	30 Orang	156,060,000	30 Orang	159,181,000	30 Orang	162,364,000	150 Orang	**1,078,105,000**		
			1	**02**	**02**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersedian Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar >70%**	**47 %**	**48,145,243,736**	**53 %**	**37,860,780,110**	**66 %**	**39,706,071,000**	**80 %**	**40,500,193,800**	**93 %**	**41,310,193,900**	**100 %**	**42,160,127,000**	**100 %**	**249,682,609,546**	**BIDANG YANKES DAN SDK**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	**02**	**02**	**2.01**	**1**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**2 Kategori**	**20,771,047,886**	**2 Kategori**	**19,693,481,510**	**2 Kategori**	**21,175,430,000**	**3 Kategori**	**21,598,938,900**	**3 Kategori**	**22,030,915,000**	**4 Kategori**	**22,495,265,000**	**4 Kategori**	**127,765,078,296**	**SEKSI YANKES PRIMER , SEKSI ALKES DAN SEKSI FARMASI**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.01	02		Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas / fasilitas puskesmas yang dibangun		-	2 unit	859,731,200	2 unit	2,498,795,000	2 unit	2,548,771,000	2 unit	2,599,746,000	2 unit	2,651,741,000		**11,158,784,200**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dibangun		-		664,416,000	2 unit	730,857,000	2 unit	803,943,300	2 unit	884,337,000	2 unit	972,771,000		**4,056,324,300**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	06		Pengembangan Puskesmas			4,216,704,000		-		-		-		-		-		**4,216,704,000**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
										Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan kualitasnya sesuai standar					2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	8 unit			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	02	2.01	09		Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas			100,300,855		-		400,000,000		400,000,000		424,526,000		400,000,000		**1,724,826,855**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
										Jumlah puskesmas yang ditingkatkan kualitas dan kuantitas prasarananya				-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	12 unit			
			1	02	02	2.01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan		67,810,820		1,751,903,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		**3,819,713,820**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
										Jumlah puskesmas pembantu yang ditingkatkan kualitas dan kuantitas prasarananya					3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	12 unit			
										Jumlah poskesdes yang ditingkatkan kualitas dan kuantitas prasarananya					5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		20 unit			
										Peningkatan kualitas gedung bangunan Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu					1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		4 unit			
			1	02	02	2.01	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		-		300,000,000		265,531,000		200,000,000		200,000,000		**965,531,000**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
										Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik konstruksi				-	2 paket	300,000,000	2 paket	265,531,000	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000	8 dokumen			
										Jumlah puskesmas yang telah memiliki bangunan pelengkap (pagar keliling)				-	2 puskesmas	-	2 puskesmas	-	2 puskesmas	-	2 puskesmas	-	8 puskesmas			
										Jumlah puskesmas pembantu yang telah memiliki bangunan pelengkap (pagar keliling)				-	2 pustu	-	2 pustu	-	2 pustu	-	2 pustu	-	8 unit			
			1	02	02	2.01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		6,076,932,181	1 Paket	5,303,492,310	1 Paket	5,409,562,000	1 Paket	5,517,753,000	1 Paket	5,628,108,000	1 Paket	5,740,670,000	1 Paket	**33,676,517,491**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjamng Medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan di puskesmas		6,210,814,400	1 Paket	3,026,608,000	1 Paket	3,087,140,000	1 Paket	3,148,882,000	1 Paket	3,211,860,000	1 Paket	3,276,097,000	5 Paket	**21,961,401,400**	SEKSI ALKES	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan yang ada di puskesmas di labuhanbatu		-	8 Paket/Set	70,000,000	8 Paket/Set	71,400,000	8 Paket/Set	72,828,000	8 Paket/Set	74,284,000	8 Paket/Set	75,770,000	40 Paket/Set	**364,282,000**	SEKSI ALKES	KABUPATEN LABUHNBATU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan Obat di Fasilitas Kesehatan sesuai Standar		2,400,389,235	20 Unit	3,979,349,000	20 Unit	4,058,935,000	20 Unit	4,140,114,600	20 Unit	4,222,916,000	20 Unit	4,307,375,000	20 Unit	**23,109,078,835**	SEKSI FARMASI	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	Terlaksananya pengadaan Bahan Medis Habis Pakai sesuai kebutuhan		1,636,596,395	98 %	3,957,982,000	98 %	4,037,141,000	98 %	4,117,884,000	98 %	4,200,242,000	98 %	4,284,247,000	98 %	**22,234,092,395**	SEKSI FARMASI	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan		61,500,000	241 Unit	80,000,000	241 Unit	81,600,000	241 Unit	83,232,000	241 Unit	84,896,000	241 Unit	86,594,000	241 Unit	**477,822,000**		
			1	**02**	**02**	**2.02**			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang diselenggarakan untuk peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan**	**NA Layanan**	**2,701,217,350**	**5 Layanan**	**1,181,640,400**	**5 Layanan**	**1,205,272,000**	**5 Layanan**	**1,229,377,900**	**5 Layanan**	**1,253,965,000**	**5 Layanan**	**1,279,044,000**	**5 Layanan**	**8,850,516,650**	**SEKSI YANKES TRADISIONAL**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan battra dan Penyehat tradisional agar melaksanakan pelayanan sesuai dengan standarisasi pelayanan kesehatan tradisional		25,564,900	15 Puskesmas	45,000,000		45,900,000		46,818,000		47,754,000		48,709,000		**259,745,900**		
										tenaga kesehatan terlatih tentang manfaat Tanaman Obat Keluarga			30 Orang													
										Tersosialisasinya SIPT dan STPT kepada Penyehat Tradisional			20 Hattra													
										persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terdeteksi, persentase penyediaan layanan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan			100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000				
			1	02	02	2.02	23		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Khusus		840,050,950		424,220,000		432,704,000		441,358,000		450,185,000		459,189,000		**3,047,706,950**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
										Jumlah Jemaah Haji yang Mendapatkan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Kesehatan	0		550 Jemaah Haji	90,071,300	600 Jemaah Haji	185,150,000	650 Jemaah Haji	212,922,500	700 Jemaah Haji	244,860,000	750 Jemaah Haji	281,590,000	3,250 Jemaah Haji			
										Jumlah mata katarak yang dioperasi			75 mata	150,000,000	100 mata	165,000,000	100 mata	181,500,000	100 mata	199,650,000	100 mata	219,615,000	475 mata			
										Jumlah orang yang mendapat layanan sunnat massal			710 Orang	184,148,700	1200 anak	202,563,000	1500 anak	222,819,900	1200 anak	245,101,900	1200 anak	269,612,000	5,810 anak			
										Jumlah orang yang mendapatkan layanan operasi bibir sumbing				100,000,000	30 orang	110,000,000	40 orang	121,000,000	40 orang	133,100,000	40 orang	146,410,000				
			1	02	02	2.02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			100,000,000		49,800,000		50,796,000		51,811,900		52,848,000		53,905,000		**359,160,900**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
										cakupan pelayanan kesehatan upaya penanggulangan masalah kesehatan			100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-				
			1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan re-akreditasi puskesmas		304,170,000	10 Puskesmas	662,620,400		675,872,000		689,390,000		703,178,000		717,241,000		**3,752,471,400**	SEKSI YANKES PRIMER	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2.02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1,431,431,500		-		-		-		-		-		-	SEKSI YANKES RUJUKAN	KABUPATEN LABUHNBATU
										Tersedianya Sarana dan prasarana PSC 119 di Kabupaten			1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-				
			1	**02**	**02**	**2.03**			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas yang disusun sesuai pedoman**	**16 Dokumen**	**121,322,100**	**16 Dokumen**	**290,000,000**	**16 Dokumen**	**295,799,000**	**16 Dokumen**	**301,715,000**	**16 Dokumen**	**307,749,900**	**16 Dokumen**	**313,904,000**	**80 Dokumen**	**1,630,490,000**	**SUBBAG PROGRAM**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi kesehatan yang tersedia sesuai ketentuan	**NA**	34,499,100	**2 Dokumen**	61,671,200	**2 Dokumen**	62,904,000	**2 Dokumen**	64,162,000	**2 Dokumen**	65,445,900	**2 Dokumen**	66,754,000	**10 Dokumen**	**355,436,200**		
			1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pelaporan tepat waktu pada Sistem Informasi terintegrasi	**5 Puskesmas**	86,823,000	**8 Puskesmas**	228,328,800	**10 Puskesmas**	232,895,000	**12 Puskesmas**	237,553,000	**14 Puskesmas**	242,304,000	**15 Puskesmas**	247,150,000	**15 Puskesmas**	**1,275,053,800**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**02**	**2.04**			**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota**	**3. Persentase Fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan mutu layanan kesehatan**	**100 %**	**785,924,100**	**100 %**	**215,200,000**	**100 %**	**219,504,000**	**100 %**	**223,894,000**	**100 %**	**228,371,000**	**100 %**	**232,937,000**	**100 %**	**1,905,830,100**	**SEKSI YANKES RUJUKAN**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	monev dan pengawasan layanan rujukan rumah sakit	**3 Kali**	12,694,100		15,000,000		15,300,000		15,606,000		15,918,000		16,236,000		**90,754,100**		
										Tersosialisasinya regulasi dan kebijakan pengawasan perizinan rumah sakit	**7 R.Sakit**															
										Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit			2 kali	15,000,000	3 kali	15,300,000	4 kali	15,606,000	5 kali	15,918,000	6 kali	16,236,000	**20 kali**			
			1	02	02	2.04	02		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Pembinaan dan pendampingan tata kelola rumah sakit sesuai standar	**2 Kali**	-		20,000,000		20,400,000		20,808,000		21,224,000		21,648,000		**104,080,000**		
										Terkoodinasinya sistem rujukan Rumah Sakit sesuai standar	**2 Kali**															
										Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pemerintah dan Swasta) yang memperoleh rekomendasi perizinan			10 faskes	20,000,000	20 faskes	22,000,000	20 faskes	24,200,000	20 faskes	26,620,000	20 faskes	29,282,000	**90** faskes			
			1	02	02	2.04	03		Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah puskesmas dengan layanan rujukan sesuai standar	**15 Puskesmas**	663,019,600		15,000,000		15,300,000		15,606,000		15,918,000		16,236,000		**741,079,600**		
										SOP Rujukan	**1 DOK**															
										Workshop Akreditasi Puskesmas			2 kegiatan	507,162,000	2 kegiatan	557,878,000	2 kegiatan	613,666,000	2 kegiatan	675,032,000	2 kegiatan	742,535,000	**10** kegiatan			
										Monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan			2 kali	15,000,000	2 kali	16,500,000	2 kali	18,150,000	3 kali	19,965,000	3 kali	21,961,000	**12** kali			
			1	02	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	beroperasionalnya pelayanan PSC	**24 Kasus Rujukan**	110,210,400		165,200,000		168,504,000		171,874,000		175,311,000		178,817,000		**969,916,400**		
										Tersedianya jasa tenaga kesehatan PSC	**6 OB**															
										Tersedianya Biaya Operasional Pelayanan PSC 119			1 tahun	165,200,000	1 tahun	168,504,000	1 tahun	171,874,000	1 tahun	175,311,000	1 tahun	178,817,000	**5** tahun			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**02**	**2.01**			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.Terdistribusinya Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas.**		**102,913,000**	**4 kali**	**130,579,000**	**4 kali**	**133,190,000**	**4 kali**	**135,854,000**	**4 kali**	**138,571,000**	**4 kali**	**141,342,000**	**20 kali**	**782,449,000**	**SEKSI FARMASI**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.01	21		Distribusi alat Kesehatan Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Terdistribusinya obat, vaksin dan BMHP		102,913,000	4 kali	130,579,000	4 kali	133,190,000	4 kali	135,854,000	4 kali	138,571,000	4 kali	141,342,000	20 kali	**782,449,000**		
			1	**02**	**02**	**2.02**			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Puskesmas dengan Pengelolaan Layanan JKN sesuai Standar/regulasi**	**NA Puskesmas**	**23,662,819,300**	**15 Puskesmas**	**16,349,879,200**	**15 Puskesmas**	**16,676,876,000**	**15 Puskesmas**	**17,010,414,000**	**15 Puskesmas**	**17,350,622,000**	**15 Puskesmas**	**17,697,635,000**	**15 Puskesmas**	**108,748,245,500**	**SEKSI YANKES PRIMER**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai pedoman masyarakat yang kurang mampu		23,662,819,300	15 Puskesmas	16,349,879,200	100 %	16,676,876,000	100 %	17,010,414,000	100 %	17,350,622,000	100 %	17,697,635,000	100 %	**108,748,245,500**		
										Terlaksananya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Kab. Labuhanbatu			1 Tahun													
										Tersedianya Jasa Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional			100 %	16,349,879,200	100 %	16,676,876,000	100 %	17,010,414,000	100 %	17,350,622,000	100 %	17,697,635,000	100 %			
										Tersedianya Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
										Meningkatnya jumlah masyarakat yang ikut dalam kepesertaan JKN			85 %		88 %		90 %		90 %		91 %					
		1	02	02	2	02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Jasa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional			1 tahun	-	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 kegiatan			
			1	**02**	**04**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standart**	**30 %**	**45,500,000**	**40 %**	**65,000,000**	**50 %**	**66,300,000**	**60 %**	**67,626,000**	**65 %**	**68,978,000**	**75 %**	**70,357,000**	**75 %**	**383,761,000**	**BIDANG SDK**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	**02**	**04**	**2.01**			**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal (UMOT)**	**Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan**	**100 %**	**18,000,000**	**100 %**	**25,000,000**	**100 %**	**25,500,000**	**100 %**	**26,010,000**	**100 %**	**26,530,000**	**100 %**	**27,060,000**	**100 %**	**148,100,000**	**SEKSI FARMASI**	**KABUPATEN LABUHNBATU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	04	2.01	.01		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi sesuai standart yang sudah dikeluarkan rekomendasi laik higiene		18,000,000	50 Sarana	25,000,000	90 unit	25,500,000	90 unit	26,010,000	90 unit	26,530,000	90 unit	27,060,000	90 unit	**148,100,000**		
										petugas mampu update aplikasi ASPAK dan memahami tentang. kalibrasi puskesmas			30 Orang													
			1	02	04	2.02			**Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentase Kelengkapan Data ASPAK Puskesmas >70%**	**40 %**	**27,500,000**	**53 %**	**40,000,000**	**67 %**	**40,800,000**	**80 %**	**41,616,000**	**93 %**	**42,448,000**	**100 %**	**43,297,000**	**100 %**	**235,661,000**	**SEKSI ALKES**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	04	2.02	02		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	Jumlah Puskesmas yang melakukan update data ASPAK	15 Puskesmas	27,500,000	15 Puskesmas	40,000,000	15 Puskesmas	40,800,000	15 Puskesmas	41,616,000	15 Puskesmas	42,448,000	15 Puskesmas	43,297,000	15 Puskesmas	**235,661,000**		
	SASARAN 1.3 : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit											**6,606,160,300**		**5,061,408,300**		**5,162,634,000**		**5,265,885,000**		**5,371,200,000**		**5,478,624,000**		**32,945,911,600**	**DINKES**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)									**95%**		**95%**		**96%**		**97%**		**98%**		**100%**		**100%**			
		Insidensi Tuberculosis per 100000 penduduk									**150 per 100000 penduduk**		**147 per 100000 penduduk**		**145 per 100000 penduduk**		**140 per 100000 penduduk**		**135 per 100000 penduduk**		**130 per 100000 penduduk**		**130 per 100000 penduduk**			
		Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi									**0.01%**		**0.01%**		**0.01%**		**0.01%**		**0.01%**		**0.01%**		**0.01%**			
			1	02	02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Terkait Penyakit Menular dan Penyaki Tidak Menular	**58 %**	**6,606,160,300**	**100 %**	**5,061,408,300**	**100 %**	**5,162,634,000**	**100 %**	**5,265,885,000**	**100 %**	**5,371,200,000**	**100 %**	**5,478,624,000**	**100 %**	**32,945,911,600**	**BIDANG P2P**	**LABUHANBATU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan LayananKesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Layanan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Terkait Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang dilaksanakan**	**NA Layanan**	**1,000,754,300**	**16 Layanan**	**1,163,400,000**	**16 Layanan**	**1,186,668,000**	**16 Layanan**	**1,210,400,000**	**16 Layanan**	**1,234,606,000**	**16 Layanan**	**1,259,298,000**	**16 Layanan**	**7,055,126,300**		**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan sesuai standar		160,811,500	328,374 Orang	241,000,000	100 %	245,820,000	100 %	250,736,000	100 %	255,751,000	100 %	260,866,000	100 %	**1,414,984,500**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayaanan keehatan		100,000,000	108,199 Orang	100,000,000	100 %	102,000,000	100 %	104,040,000	100 %	106,120,000	100 %	108,243,000	100 %	**620,403,000**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan		100,000,000	5,155 Orang	100,000,000	100 %	102,000,000	100 %	104,040,000	100 %	106,120,000	100 %	108,243,000	100 %	**620,403,000**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	10	Jumlah penderita ODGJ yang dilayani sesuai standa	Persentase ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar		38,199,500	**388 Orang**	58,000,000	**100 %**	59,160,000	**100 %**	60,343,000	**100 %**	61,550,000	**100 %**	62,781,000	**100 %**	**340,033,500**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis (TB) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		160,500,000	**100 %**	185,000,000	**100 %**	188,700,000	**100 %**	192,474,000	**100 %**	196,323,000	**100 %**	200,249,000	**100 %**	**1,123,246,000**	SEKSI P2M	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	erperiksanya jumlah orang dengan faktor resiko HIV sesuai standar		287,797,300	**24,348 Orang**	185,000,000	**100 %**	188,700,000	**100 %**	192,474,000	**100 %**	196,323,000	**100 %**	200,249,000	**100 %**	**1,250,543,300**	SEKSI P2M	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang mendapatkan edukasi dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa		25,000,000	**100 Orang**	40,000,000	**100 %**	40,800,000	**100 %**	41,616,000	**100 %**	42,448,000	**100 %**	43,297,000	**100 %**	**233,161,000**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan bahaya NAPZA		128,446,000	**200 Orang**	254,400,000	**100 %**	259,488,000	**100 %**	264,677,000	**100 %**	269,971,000	**100 %**	275,370,000	**100 %**	**1,452,352,000**	SEKSI PTM	KABUPATEN LABUHNBATU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan LayananKesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**100 %**	**4,479,685,200**	**100 %**	**1,969,441,100**	**100 %**	**2,008,829,000**	**100 %**	**2,049,006,000**	**100 %**	**2,089,985,000**	**100 %**	**2,131,785,000**	**100 %**	**14,728,731,300**	**SEKSI IMUNISASI, DAN SEKSI P2M**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya layanan UKM Essensial Terlaksananya Pencegahan dan penagnagan covid-19		4,077,031,900	**100 %** **100 %**	1,774,485,800	**100 %**	1,809,975,000	**100 %**	1,846,175,000	**100 %**	1,883,098,000	**100 %**	1,920,760,000	**100 %**	**13,311,525,700**	SEKSI IMUNISASI, DAN SEKSI P2M	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah laporan STP Dinas Kesehatan		394,303,300	**12 Laporan**	189,005,300		192,785,000		196,641,000		200,573,000		204,585,000		**1,377,892,600**	SEKSI IMUNISASI,	KABUPATEN LABUHNBATU
									Peningkatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan STP	1 Laporan	-	100% Laporan	179,300,000	100% Laporan	206,195,000	100% Laporan	237,124,000	100% Laporan	272,692,000	100% Laporan	313,596,000	100% Laporan	**1,208,907,000**		
			1	02	02	2	02	28	Pengambilan dan Pengiriman specimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional	Frekuensi pengambilan dan pengiriman spesimen kasus MR, AFP dan KLB	1 Kali	5,950,000		5,950,000		6,069,000		6,190,000		6,314,000		6,440,000		**36,913,000**	SEKSI IMUNISASI,	KABUPATEN LABUHNBATU
									Pengambilan dan pengiriman specimen kasus MR,AFP dan KLB	Pengambilan dan pengiriman specimen kasus MR,AFP dan KLB	5 Kali Spesimen	-	6 Kali Spesimen	5,950,000	6 Kali Spesimen	6,069,000	7 Kali Spesimen	6,190,000	7 Kali Spesimen	6,314,000	10 Kali Spesimen	6,440,000	10 Kali Spesimen	6,440,000		
			1	02	02	2	02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah		2,400,000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	SEKSI IMUNISASI, P2M	KABUPATEN LABUHNBATU
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan LayananKesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Puskesmas yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan**	**93 %**	**56,775,600**	**100 %**	**215,667,500**	**100 %**	**219,980,000**	**100 %**	**224,379,000**	**100 %**	**228,867,000**	**100 %**	**233,444,000**	**100 %**	**1,179,113,100**	**SEKSI IMUNISASI,**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita		-	8,535 Orang	88,793,600		90,569,000		92,380,000		94,228,000		96,113,000		**462,083,600**		
										Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100%													
									Imunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	1 Bayi	-	100% Bayi		100% Bayi		100% Bayi		100% Bayi		100% Bayi		100% Bayi			
										Persentase anak Usia 18-24 Bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan MR	1 Batita	-	100% Batita		100% Batita		100% Batita		100% Batita		100% Batita		100% Batita			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah anak sekolah dasar Kelas I,II dan V yang mendapatkan imunisasi BIAS DT,Td,dan MR pada Anak SD		-	21,606 Orang	9,073,900		9,255,000		9,440,000		9,629,000		9,821,000		**47,218,900**		
										Persentase Anak Usia pendidikan dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			100%													
									Imunisasi BIAS DT, Td dan MR	Persentase Anak SD yang Mendapatkan Imunisasi BIAS DT, Td dan MR	1 Anak SD Kls I,II,V	-	100% Anak SD Kls I,II,V	98,100,000	100% Anak SD Kls I,II,V	#VALUE!	100% Anak SD Kls I,II,V	#VALUE!	100% Anak SD Kls I,II,V	#VALUE!	100% Anak SD Kls I,II,V	#VALUE!	100% Anak SD Kls I,II,V			
			1	02	02	2	02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi KIPI		56,775,600	2 Laporan	117,800,000		120,156,000		122,559,000		125,010,000		127,510,000		**669,810,600**		
			1	**02**	**02**	**2**	**02**		**Penyediaan LayananKesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Puskesmas mampu memberikan Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**	**100 %**	**1,068,945,200**	**100 %**	**1,712,899,700**	**100 %**	**1,747,157,000**	**100 %**	**1,782,100,000**	**100 %**	**1,817,742,000**	**100 %**	**1,854,097,000**	**100 %**	**9,982,940,900**	**SEKSI P2M**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	02	2	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Fokus Penyemprotan Sarang Nyamuk / Fogging DBD		1,068,945,200	100 Fokus	1,712,899,700		1,747,157,000		1,782,100,000		1,817,742,000		1,854,097,000		**9,982,940,900**		
										Jumlah ibuh hamil yang mendzpatkan Deteksi Dini Hepatitis B			5,680 Orang													
										Jumlah orang yang mendapatkan layanan pengobatan Kusta			7 Orang													
										Jumlah orang yang mendapat layanan pemberian obat pencegahan massal cacingan			50,000 Orang													
										Jumlah penemuan dan pengobatan kasus Diare			8,720 Orang													
										Jumlah penemuan dan tatalaksana kasus ISPA			1,546 Orang													

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
										Jumlah Puskesmas melaksanakan penemuan dan pengobatan GHPR			15 Puskesmas													
										Jumlah suspek Malaria yang terkofirmasi laboratorium			400 Orang													
										tercapainya 100% sasaran pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacing pada usia 12 bulan sampai 12 tahun	85 %		90 %		90 %		95 %		100 %		100 %		100 %			
										Angka Pelacakan kasus kusta	80 %		80 %		80 %		85 %		85 %		85 %		85 %			
										Angka penjaringan kasus frambusia meningkat	80 %		80 %		80 %		85 %		85 %		85 %		85 %			
										Angka Pelacakan kasus GHPR	80 %		80 %		85 %		85 %		90 %		90 %		90 %			
										Tatalaksana kasus ISPA/Pneumonia	80 %		80 %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %			
										Penemuan dan pengobatan kasus diare	80 %		80 %		85 %		85 %		85 %		85 %		85 %			
										Deteksi dini Hepatitis B pada bumil	80 %		85 %		85 %		90 %		95 %		95 %		95 %			
										Terlaksananya penemuan dan pengobatan Endemik Malaria	50 fokus		60 fokus		70 fokus		75 fokus		80 fokus		90 fokus		90 fokus			
										Terlaksananya Penyemprotan Sarang Nyamuk / Fogging DBD	100 fokus		120 fokus		125 fokus		130 fokus		135 fokus		140 fokus		140 fokus			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
MENINGKATNYA TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																										
Sasaran 2.1. MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN												**80,851,421,209**		**74,460,350,705**		**75,949,554,800**		**77,468,540,000**		**79,017,907,000**		**80,598,265,000**		**468,346,038,714**	**DINKES**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan (dari Inspektorat Daerah)									**72.69%**		**73%**		**73.50%**		**74%**		**74.50%**		**75%**		**75%**			
			1	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**80,851,421,209**	**% 100**	**74,460,350,705**	**% 100**	**75,949,554,800**	**% 100**	**77,468,540,000**	**% 100**	**79,017,907,000**	**% 100**	**80,598,265,000**	**% 100**	**468,346,038,714**	**SKREATARIAT**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	**02**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku**	**19 Dokumen**	**88,884,700**	**18 Dokumen**	**101,935,600**	**18 Dokumen**	**103,974,000**	**18 Dokumen**	**106,051,000**	**18 Dokumen**	**108,172,000**	**18 Dokumen**	**110,335,000**	**90 Dokumen**	**619,352,300**	**SUBBAG PROGRAM**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang disusun		23,000,000	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	27,540,000	1 Dokumen	28,090,000	1 Dokumen	28,652,000	1 Dokumen	29,225,000	5	**163,507,000**		
			1	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD sesuai pedoman		7,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,140,000	1 Dokumen	7,282,000	1 Dokumen	7,428,000	1 Dokumen	7,577,000	5 Dokumen	**43,427,000**		
			1	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD sesuai pedoman		5,250,300	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,160,000	1 Dokumen	8,323,000	1 Dokumen	8,489,000	1 Dokumen	8,659,000	5 Dokumen	**46,881,300**		
			1	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD sesuai pedoman		10,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,160,000	1 Dokumen	8,323,000	1 Dokumen	8,489,000	1 Dokumen	8,659,000	5 Dokumen	**51,631,000**		
			1	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD sesuai pedoman		5,224,400	1 Dokumen	6,935,600	1 Dokumen	7,074,000	1 Dokumen	7,215,000	1 Dokumen	7,360,000	1 Dokumen	7,507,000	5 Dokumen	**41,316,000**		
			1	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ, LPPD, PK dan Rencana Aksi		25,000,000	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	20,400,000	5 Dokumen	20,808,000	5 Dokumen	21,224,000	5 Dokumen	21,648,000	25 Dokumen	**129,080,000**		
			1	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Renja-Renstra, SPM)		13,410,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,500,000	8 Dokumen	26,010,000	8 Dokumen	26,530,000	8 Dokumen	27,060,000	40 Dokumen	**143,510,000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target Akhir 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
			1	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**NA**	**74,351,024,509**	**21 Dokumen**	**68,487,512,805**	**19 Dokumen**	**69,857,262,000**	**19 Dokumen**	**71,254,406,000**	**19 Dokumen**	**72,679,494,000**	**19 Dokumen**	**74,133,085,000**	**95 Dokumen**	**430,762,784,314**	**SUBBAG KEU DAN ASET**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya biaya gaji, Tunjangan, dan TPP ASN		74,324,845,559	840 orang	68,197,750,405	848 orang	69,561,705,000	857 orang	70,952,939,000	865 orang	72,371,998,000	874 orang	73,819,438,000	4,285 orang	**429,228,675,964**		
										Terlaksananya pembayaran gaji dan TPP ASN RSUD Rantauprapat			1 Tahun													
			1	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya biaya jasa Pengelola Teknis Kegiatan		-	20 orang	270,600,000	20 orang	276,012,000	20 orang	281,532,000	20 orang	287,162,000	20 orang	292,906,000	100 orang	**1,408,212,000**		
			1	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya laporan keuangan tahunan		8,000,000	1 dokumen	7,362,400	1 dokumen	7,509,000	1 dokumen	7,659,000	1 dokumen	7,813,000	1 dokumen	7,969,000	5 dokumen	**46,312,400**		
			1	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	tersedianya laporan keuangan Bulanan, Triwulan dan semester		15,000,000	18 dokumen	8,000,000	18 dokumen	8,160,000	18 dokumen	8,323,000	18 dokumen	8,489,000	18 dokumen	8,659,000	90 dokumen	**56,631,000**		
			1	02	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran		3,178,950	4 laporan	3,800,000	4 laporan	3,876,000	4 laporan	3,953,000	4 laporan	4,032,000	4 laporan	4,113,000	20 laporan	**22,952,950**		
			1	**02**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Asset/ Barang Milik Daerah**	**3**	**41,400,000**	**2 dokumen**	**40,000,000**	**2 dokumen**	**40,800,000**	**2 dokumen**	**41,616,000**	**2 dokumen**	**42,448,000**	**2 dokumen**	**43,297,000**	**10 Dokumen**	**249,561,000**	**SUBBAG KEU DAN ASET**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah		41,400,000	2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	40,800,000	2 dokumen	41,616,000	2 dokumen	42,448,000	2 dokumen	43,297,000	2 dokumen	**249,561,000**		
			1	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang memiliki sertifikat bimtek peraturan perundang - undangan**	**NA**	**-**	**4 orang**	**40,000,000**	**4 orang**	**40,800,000**	**4 orang**	**41,616,000**	**4 orang**	**42,448,000**	**4 orang**	**43,297,000**	**20 orang**	**208,161,000**	**SUBBAG UMPEG**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	0 0	-	840 orang	-	840 orang	-	840 orang	-	840 orang	-	3360 orang	**-**		
			1	02	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur menigkuti Bimtek		-	0 0	-	10 orang	-	15 orang	-	20 orang	-	20 orang	-	65 orang	**-**		
			1	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur menigkuti Bimtek		-	4 orang	40,000,000	10 orang	40,800,000	15 orang	41,616,000	20 orang	42,448,000	20 orang	43,297,000	69 orang	**208,161,000**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022			2023			2024			2025			2026			Target Akhir 2026			Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH	TARGET		RUPIAH		
			1	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor**	**100**	**412,282,300**	**100**	**%**	**471,464,400**	**100**	**%**	**480,893,000**	**100**	**%**	**490,510,000**	**100**	**%**	**500,319,000**	**100**	**%**	**510,324,000**	**100**	**%**	**2,865,792,700**	**SUBBAG UMPEG**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor		30,000,000	500	unit	30,000,000	510	unit	30,600,000	520	unit	31,212,000	530	unit	31,836,000	540	unit	32,472,000	2600	unit	**186,120,000**		
			1	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		-	40	unit	143,900,000	45	unit	146,778,000	50	unit	149,713,000	55	unit	152,707,000	60	unit	155,761,000	250	unit	**748,859,000**		
			1	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya bahan logistik kantor (ATK , peralatan/bahan pembersih)		61,312,300	3000	buah	35,000,000	1000	buah	35,700,000	1200	buah	36,414,000	1300	buah	37,142,000	1400	buah	37,885,000	7900	buah	**243,453,300**		
			1	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetak dan penggandaan		37,110,000	7	jenis	40,000,000	8	jenis	40,800,000	8	jenis	41,616,000	8	jenis	42,448,000	8	jenis	43,297,000	39	jenis	**245,271,000**		
			1	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		18,520,000	50	buah	40,564,400	50	buah	41,375,000	50	buah	42,203,000	50	buah	43,047,000	50	buah	43,908,000	250	buah	**229,617,400**		
			1	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu		-	15	kali	4,000,000	15	kali	4,080,000	15	kali	4,161,000	15	kali	4,244,000	15	kali	4,329,000	75	kali	**20,814,000**		
			1	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		265,340,000	240	kali	178,000,000	250	kali	181,560,000	260	kali	185,191,000	270	kali	188,895,000	280	kali	192,672,000	1300	kali	**1,191,658,000**		
			1	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**NA**	**-**	**1**	**unit**	**450,000,000**	**466**	**unit**	**459,000,000**	**465**	**unit**	**468,180,000**	**465**	**unit**	**477,543,000**	**-**	**unit**	**487,094,000**	**-**	**unit**	**2,341,817,000**	**SUBBAG UMPEG**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya mobil dinas jabatan		-	1	unit	450,000,000	1	unit	459,000,000	0	unit	468,180,000	0	unit	477,543,000	0	unit	487,094,000	2	unit	**2,341,817,000**		
			1	02	01	2.07	05		Pengadaan Meubiler	Terpenuhinya Kebutuhan Meubiler Kantor dan Puskesmas		-	0	0	-	465	unit	-	465	unit	-	465	unit	-	0	unit	-	1395	unit	**-**		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Sasaran Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	2021		2022				2023				2024				2025				2026				Target Akhir 2026				Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
											TARGET	RUPIAH	TARGET		RUPIAH		TARGET		RUPIAH		TARGET		RUPIAH		TARGET		RUPIAH		TARGET		RUPIAH		TARGET		RUPIAH			
			1	**02**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**5,597,860,000**	**100**	**%**	**4,409,100,000**		**100**	**%**	**4,497,282,000**		**100**	**%**	**4,587,227,000**		**100**	**%**	**4,678,971,000**		**100**	**%**	**4,772,551,000**		**100**	**%**	**28,542,991,000**		**SUBBAG UMPEG**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan belanja komunikasi, air , internet dan listrik perkantoran		467,000,000	200	rekening	413,000,000		200	rekening	421,260,000		200	rekening	429,685,000		200	rekening	438,278,000		200	rekening	447,044,000		1000	rekening	**2,616,267,000**			
			1	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa/honor tenaga kontrak		5,130,860,000	704	OB	3,996,100,000		708	OB	4,076,022,000		708	OB	4,157,542,000		708	OB	4,240,693,000		708	OB	4,325,507,000		3536	OB	**25,926,724,000**			
			1	**02**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**281**	**359,969,700**	**289**	**unit**	**460,337,900**		**302**	**unit**	**469,543,800**		**315**	**unit**	**478,934,000**		**329**	**unit**	**488,512,000**		**334**	**unit**	**498,282,000**		**1569**	**unit**	**2,755,579,400**		**SUBBAG UMPEG**	**KABUPATEN LABUHNBATU**
			1	02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	frekuensi service Kenderaan dinas jabatan Terpenuhinya pemeliharaan Kenderaan dinas jabatan		39,447,900	4 2	Kali Unit	39,447,900		2	unit	40,236,000		2	unit	41,041,000		2	unit	41,862,000		2	unit	42,699,000		2	unit	**244,733,800**			
			1	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya jasa pemeliharaan kenderaan dinas operasional		243,031,800	150	unit	303,400,000		155	unit	309,468,000		160	unit	315,657,000		165	unit	321,970,000		165	unit	328,409,000		795	unit	**1,821,935,800**			
			1	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya		37,490,000	75	unit	37,490,000		80	unit	38,239,800		85	unit	39,004,000		90	unit	39,784,000		95	unit	40,580,000		425	unit	**232,587,800**			
			1	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor		-	4	unit	40,000,000		5	unit	40,800,000		6	unit	41,616,000		7	unit	42,448,000		7	unit	43,297,000		29	unit	**208,161,000**			
			1	02	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya rehab sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		40,000,000	58	unit	40,000,000		60	unit	40,800,000		62	unit	41,616,000		65	unit	42,448,000		65	unit	43,297,000		310	unit	**248,161,000**			
TOTAL ANGGARAN RENSTRA											**162,171,145,145**		**133,262,987,400**				**137,017,685,800**				**139,758,034,800**				**142,553,182,700**				**145,427,972,000**				**860,191,007,845**			

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/ atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Capaian Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahu					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Kinerja Utama							
	TUJUAN 1 : Meningkatkan Status kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan							
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,95	69,95	69,96	69,98	70,00	70,00	70,00
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Sehat							
1.	Jumlah kematian ibu maternal (kasus)	14 kss	14 kss	12 kss	10 kss	8 kss	5 kss	5 kss
2.	angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup	3 per 1000 KH	3 per 1000 KH	2 per 1000 KH	2 per 1000 KH	1 per 1000 KH	1 per 1000 KH	1 per 1000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) (%)	27%	24 %	20 %	14 %	14 %	14%	14 %
	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akses, Mutu Layanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan							
4	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta /Universal Health Coverage (UHC)	65%	70%	80%	85%	90%	98%	98%
5.	Persentase Fasilitas Kesehatan Pertama terakreditasi Madya	20%	26%	33%	46%	60%	66%	66%
6.	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Sasaran 1.3. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
9.	InsIdensi Tuberculosis per 100000 penduduk	150 per 100000 penduduk	147 per 100000 penduduk	145 per 100000 penduduk	140 per 100000 penduduk	135 per 100000 penduduk	130 per 100000 penduduk	130 per 100000 penduduk
10.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola, Transparasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
	Nilai Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (Dari Inspektorat Daerah)	26	35	55	60	65	70	70
	Sasaran 1.3. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan							
1.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	72,69	73	73,5	74	74.5	75	75

BAB 8
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 –2026 yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu di bidang kesehatan, yang akan menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu beserta UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan dan dapat dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Berhasilnya pembangunan Kabupaten Labuhanbatu sebagai sub sistem pembangunan Nasional menuntut peran aktif masyarakat dan kemandirian masyarakat, yang dilandasi oleh sikap, tekad dan semangat, ketaatan serta disiplin para penyelenggara. Untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat. Pada akhirnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menghantarkan pada **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2024.**

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat Kabupaten, Dinas Kesehatan maupun UPTD. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU

H. ILHAM, SKM, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670511 198903 1 003